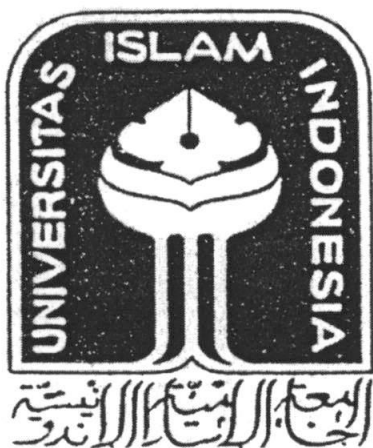


PETANI DAN KEMISKINAN
Studi Mengenai Upaya Petani
dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga
di Kecamatan Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya



Oleh:

Drs. Bakhtiar Khobir
NIM. 9901106

TESIS

Diajukan kepada Magister Studi Islam
Program Pascasarjana Universitas Islam Indonesia
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
guna Memperoleh Gelar
Magister Studi Islam

YOGYAKARTA
2002

PETANI DAN KEMISKINAN
Studi Mengenai Upaya Petani
dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga
di Kecamatan Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya



Oleh:

Drs. Bakhtiar Khobir
NIM. 9901106

Pembimbing:
Drs. Akh. Minhaji, MA., Ph.D

TESIS

Diajukan kepada Magister Studi Islam
Program Pascasarjana Universitas Islam Indonesia
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
guna Memperoleh Gelar
Magister Studi Islam

YOGYAKARTA
2002



MAGISTER STUDI ISLAM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta
Telp. (0274) 523637 Fax. 523637

PENGESAHAN

TESIS berjudul : PETANI DAN KEMISKINAN (Studi Mengenai Upaya Petani dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga di Kecamatan Singaparna , Kabupaten Tasikmalaya)

Ditulis oleh : Drs. Bakhtiar Khobir

N.I.M. : 9901106

Konsentrasi : Ekonomi Islam

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister dalam Ilmu Ekonomi Islam.



Yogyakarta, Juni 2004

Ketua Program

Dr. H. Amir Mu'allim, MIS



MAGISTER STUDI ISLAM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta
Telp. (0274) 523637 Fax. 523637

TIM PENGUJI UJIAN TESIS

Nama : Drs. Bakhtiar Khobir
Tempat/tgl.lahir : Singaparna, 30 Desember 1954
N. I. M. : 9901106
Konsentrasi : Ekonomi Islam
Judul Tesis : PETANI DAN KEMISKINAN (Studi Mengenai Upaya Petani dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga di Kecamatan Singaparna , Kabupaten Tasikmalaya)

Ketua : Dr. H. Amir Muralim, MIS

Sekretaris : Drs. H. Asmuni, MA.

Pembimbing : Drs. Akh. Minhaji, MA., Ph.D

Penguji : Drs. H. Edy Suandi Hamid, M.Ec

Penguji : Drs. H. Syafarudin Alwi, MS

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

Diuji di Yogyakarta pada tanggal 12 Maret 2002

Pukul 10.00 s/d 12.00 WIB

Hasil / Nilai : 79,8 / B

Predikat : Sangat Memuaskan



Program Pascasarjana
Magister Studi Islam (S-2)
Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

PERSETUJUAN

Tesis berjudul : PETANI DAN KEMISKINAN (Studi tentang Persepsi
Petani tentang Kemiskinan dan Partisipasi Mereka
dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga di
Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya)



Yogyakarta,  2001.

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

Bimbing,

DRS. AKHMAD MINHAJI, M.A, Ph.D.

Bidang Akademik
Magister Studi Islam

DRS. YUSDANI, M.Ag.

Motto:

إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ كَانَ بَعِيدًا
خَيْرًا بَصِيرًا . (الاسراء: 30)

"Sesungguhnya Tuhanmu melapangkan rizki kepada siapa yang Dia kehendaki dan menyempitkannya; sesungguhnya Dia Maha Mengetahui lagi Maha Melihat akan hamba-hamba-Nya" (Q.S. Al-Isra':30).

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

Dipersembahkan tesis ini teruntuk:
Ibunda dan Anak-anakku
Serta Almarhum Isteriku

ABSTRAK

Drs. Bakhtiar Khobir. ***PETANI DAN KEMISKINAN (Studi Mengenai Upaya Petani dalam Meningkatkan kesejahteraan Keluarga di Kecamatan Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya)***

Petani dan kemiskinan merupakan dua sisi yang berbeda, namun keduanya senantiasa melekat. Petani selalu identik dengan kemiskinan. Akan tetapi tidak semua petani itu miskin. Oleh karena itu, persepsi mereka tentang kemiskinan sangatlah berbeda satu sama lainnya.

Permasalahan yang paling mendasar dalam penelitian ini adalah bagaimana upaya petani dalam meningkatkan kesejahterannya guna mengentaskan kemiskinan dilihat dari pemenuhan kebutuhan sandang, pangan, perumahan, kesehatan, dan pendidikan.

Jenis penelitian adalah penelitian lapangan. Dalam penelitian ini ingin diungkapkan mengenai upaya petani miskin dalam meningkatkan kesejahteraan keluarganya.

Pemikiran dari penelitian ini berangkat dari sabda Rasulullah saw., yang mengatakan bahwa kemiskinan lebih dekat kepada kekufuran.

Metode penelitian yang digunakan adalah survai. Sampel penelitian sebanyak 100 orang petani yang ada di Desa Cipakat dan Cikunir Kecamatan Singaparna. Teknik pengumpulan data pokok yaitu angket dan wawancara. Analisis data dilakukan dengan analisis data kualitatif dan kuantitatif dengan pendekatan tabel-tabel.

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh data bahwa persepsi petani di Kecamatan Singaparna mengenai kemiskinan dilihat dari pemenuhan kebutuhan sandang, pangan, perumahan, kesehatan dan pendidikan termasuk kategori rendah/kurang. Karena nilai kategori yang diperoleh adalah sebesar 1,34 yang berarti pada interval nilai rendah (1,00 – 1,66). Dalam hal ini kebutuhan dasar manusia seperti sandang, pangan, perumahan, kesehatan dan pendidikan di kalangan petani di Kecamatan Singaparna belum terpenuhi secara minimal, apalagi maksimal. Adapun upaya yang dilakukan oleh petani di Kecamatan Singaparna dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga guna mengentaskan kemiskinan yaitu melalui meningkatkan pendapatan ekonomi keluarga dan meningkatkan kualitas pendidikan guna meningkatkan kualitas SDM. Sedangkan kendala yang dihadapi oleh petani di Kecamatan Singaparna dalam upaya meningkatkan kesejahteraan keluarganya meliputi: keterbatasan kesempatan kerja, rendahnya kualitas SDM, minimnya modal usaha, kurangnya peranan pemerintah, dan rendahnya potensi alam.

ABSTRACT

Drs. Bakhtiar Khobir. **THE PEASANT AND POVERTY (A Study on Peasant's Perception about Poverty and Their Participation to Achieve Their Family's Welfare at Subdistrict Singaparna, Tasikmalaya)**

Peasant and Poverty (Study related to Peasant's effort in improving family's welfare in Singaparna Sub-district, Tasikmalaya Regency).

Peasant and poverty are two different kind of matter but always bonded together side by side. Peasant is commonly identical to poverty. The fact is that not all of the peasant are poor. Regarding to that fact mentioned above, the peasant's perception about poverty itself is remarkably different among one another.

This study deal with one principal problem, that is the peasant's effort in improving family's welfare to meet the needs of clothing and food, house, health and education.

This kind of study is a field study, which intends to reveal the poor peasant's effort in improving family's welfare.

The thought of this study based on the prophet's word which is saying that poverty is close to infidelity.

Survey methods was applied in this study. The subject of this study were the peasants whom stayed in Cipakat Region and Cikatan Sub-district with 100 peasants as the respondent. The primary data were obtained with questionnaire and interview technique about the respondents. The data then were analyzed through qualitative and quantitative data analysis with approach based on tables.

The result shows that peasant's perception about poverty related to the family's needs fulfillment include clothing and food, health and education is categorized into lower category. This conclusion is logically derived from the categorical value of peasant in Singaparna Sub-district 1,34 which is presented in 1,00 – 1,66 lower value interval. This value of 1,34 means that the family's needs in peasant society, Singaparna Sub-district have not been filled minimally yet, let alone maximally. And the effort that peasant did in the objective to improve the family's welfare was through improving family's income and improving educational quality which was aim at improving human resource's quality. Whereas, the constrains which are faced by peasant in Singaparna Sub-district in the effort to improve the family's welfare, consist of : lack of job opportunities, lack of human resource's quality, lack of working capital, lack of government's role and lack of nature's potential.

KATA PENGANTAR



Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah swt yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya, sehingga tesis ini dapat diselesaikan sesuai dengan harapan semua pihak. Shalawat serta salam mudah-mudahan ditetapkan untuk baginda Rasulullah saw beserta keluarganya, shahabatnya, dan ummatnya hingga akhir zaman. Amin.

Tulisan berjudul: **Petani dan Kemiskinan (Studi Mengenai Upaya Petani dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga di Kecamatan Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya)**, merupakan upaya maksimal penulis dalam memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Magister dalam Ilmu Agama Islam di Program MSI UII Yogyakarta.

Dengan ungkapan rasa syukur ke hadirat Illahi Rabbi, penulis patut mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dan mendorong hingga usainya tugas ini. Ucapan terima kasih disampaikan kepada yang terhormat:

1. Bapak Drs. H. Amir Mu'allim, MIS., selaku Ketua Program Magister Studi Islam UII Yogyakarta.

2. Bapak Drs. H. Asmuni Mth., MA., selaku Kepala Bidang Akademik Magister Studi Islam UII Yogyakarta.
3. Bapak Drs. Akhmad Minhaji, M.A., Ph.D., selaku Pembimbing tesis ini.
4. Bapak Camat Kecamatan Singaparna beserta jajarannya, yang telah memberikan kesempatan untuk melakukan penelitian di wilayah kerjanya.
5. Isteri dan anak-anakku tercinta yang telah memberikan dorongan moral kepada penulis ketika mengikuti studi ini.
6. Teman-teman senasib dan seperjuangan Kelas C Cipasung Tasikmalaya, yang telah saling memotivasi untuk menyelesaikan studi di Program MSI UII Yogyakarta.
7. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu dalam kesempatan terbatas ini.

Mudah-mudahan Allah swt berkenan membalas amal baik mereka. Amîn.

Akhirnya, penulis berdo'a semoga tesis ini dapat bermanfaat adanya.

Terima kasih.

Singaparna, Juni 2001

Penulis,

Drs. Bakhtiar Khobir

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN DEPAN	i
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN TIM PENGUJI	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiv
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	10
D. Telaah Pustaka	11
E. Kerangka Teori	13
F. Metodologi Penelitian	25
1. Jenis Penelitian	25
2. Metode Penelitian	26
3. Populasi dan Sampel	27
4. Teknik Pengumpulan Data	30
5. Analisis Data	31
G. Sistematika Pembahasan	34

BAB	II. PERSEPSI MASYARAKAT TENTANG KESEJAHTERAAN	37
	A. Pengertian, Ciri-ciri dan Proses Terjadinya Persepsi	37
	1. Pengertian Persepsi	37
	2. Ciri-ciri Persepsi	40
	3. Proses Persepsi	42
	B. Tinjauan tentang Kesejahteraan	44
	1. Pengertian Kesejahteraan	44
	2. Indikator-indikator Kesejahteraan	47
	3. Kesejahteraan dalam Tinjauan Islam..	49
BAB	III. GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN	55
	A. Geografi dan Kependudukan	55
	B. Kondisi Sosial Ekonomi dan Pendidikan....	60
	C. Kesehatan dan Keluarga Berencana	66
	D. Agama dan Kebudayaan	67
	E. Organisasi Massa	74
	F. Hubungan Antarwarga	76
BAB	IV. HASIL DAN PEMBAHASAN TENTANG UPAYA PETANI DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN KELUARGA DI KECAMATAN SINGAPARNA	78
	A. Persepsi Petani di Kecamatan Singaparna Mengenai Kemiskinan Dilihat dari Pemenuhan Kebutuhan Sandang, Pangan, Perumahan, Kesehatan dan Pendidikan.....	78

B. Upaya Petani Miskin Pedesaan di Kecamatan Singaparna dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarganya	104
C. Kendala-kendala yang Dihadapi Petani Miskin Pedesaan di Kecamatan Singaparna dalam Meningkatkan Kesejahteraan...	109
BAB V. PENUTUP	112
A. Simpulan	112
B. Saran-saran	113
DAFTAR PUSTAKA	115
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

DAFTAR TABEL

Nomor	Isi	Halaman
1	Penggunaan Tanah di Wilayah Kecamatan Singaparna Tahun 2001	58
2	Keadaan Penduduk Kecamatan Singaparna Tahun 2001	59
3	Jumlah Penduduk Kecamatan Singaparna Berdasarkan Wilayah Pedesaan Tahun 2001	59
4	Keadaan Tingkat Pendidikan Penduduk Kecamatan Singaparna Tahun 2001	63
5	Struktur Pekerjaan Penduduk Kecamatan Singaparna Tahun 2001	64
6	Persepsi Responden Mengenai Frekuensi Membeli Pakaian	79
7	Persepsi Responden Mengenai Harga Pakaian yang Dibeli	81
8	Persepsi Responden Mengenai Pemenuhan Gizi Makanan yang Dikonsumsi	84
9	Persepsi Respponden Mengenai Frekuensi Makan dalam Tiap Hari	86
10	Persepsi Responden Mengenai Jenis Perumahan yang Dihuni	88
11	Persepsi Responden Mengenai Harga Jual Rumah yang Dihuni	89

12	Persepsi Responden Mengenai Keinginan Berobat Jika Sakit	92
13	Persepsi Responden Mengenai Frekuensi Kunjungan ke Dokter atau Puskesmas	94
14	Persepsi Responden Mengenai Menyekolahkan Anak	97
15	Persepsi Responden Mengenai Fasilitas Pendidikan yang Dimiliki	99
16	Rekapitulasi Nilai Persepsi Petani Mengenai Kemiskinan Dilihat dari Pemenuhan Kebutuhan Sandang, Pangan, Perumahan, Kesehatan dan Pendidikan	101



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ekonomi rakyat Indonesia dewasa ini berada di persimpangan jalan. Potensinya untuk berkembang sebenarnya semakin terbuka, karena seluruh bangsa sudah sangat menyadari perlunya pemerataan prakondisi perwujudan keadilan sosial. Artinya, ekonomi rakyat kecil yang selama ini banyak "tergusur" perlu benar-benar digarap dan dikembangkan.

Masih besarnya jumlah keluarga miskin merupakan tantangan. Konstitusi kita mewajibkan pemerintah untuk memelihara kaum miskin, baik secara langsung, seperti ditegaskan dalam pasal 34 UUD 1945: *"Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara"*, maupun melalui penyediaan peluang kerja dan usaha, sebagaimana ditegaskan dalam pasal 27 ayat (2) UUD 1945: *"Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan"*.

Keprihatinan seluruh bangsa Indonesia khususnya umat beragama terhadap kehidupan fakir miskin (kaum dhu'afa) tidak perlu diragukan lagi. Keempat alinea Pembukaan UUD 1945 menunjukkan kemauan

sejahtera tentunya adalah orang yang tercukupi sandang pangannya, pakaian, dan rumah ada sekadarnya, yang bisa membuat orang *kerasan* tinggal di rumah, kesehatan terpelihara, dan anak-anak dapat bersekolah atau memperoleh pendidikan yang diinginkannya.

Dengan demikian, batasan kesejahteraan menurut pengertian tersebut di atas adalah tercukupinya sandang, pangan, papan, pendidikan, dan kesehatan. Dengan kata lain, orang yang tidak sejahtera adalah mereka yang tidak tercukupi sandang, pangan, papan, pendidikan, dan kesehatan.

Dalam pandangan Islam, keluarga yang termasuk sejahtera adalah keluarga yang sejahtera lahir dan batin. Kesejahteraan lahir dan batin diwujudkan dengan adanya nilai-nilai ketenteraman (*sakinah*), penuh kasih sayang (*mawaddah wa rahmah*). Hal ini sebagaimana tercermin dalam firman Allah SWT. dalam surat An-Nūr ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. النور: ٢١

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".²

² Q.S. An-Nūr (24):21

Dari zaman ke zaman, umat manusia selalu dihadapkan kepada kenyataan adanya golongan masyarakat yang miskin. Di samping itu, terdapat sekelompok anggota masyarakat yang dapat digolongkan kaya. Hal ini tidak saja terjadi pada negara-negara yang digolongkan miskin, tetapi juga terjadi di negara-negara yang digolongkan kaya.

Keadaan yang sudah berlaku dari zaman ke zaman itu memberi kesan kepada kita, bahwa adanya keadaan kaya-miskin seakan-akan sudah merupakan takdir, yang tidak dapat lagi diubah. Kesan itu memang tidak salah, karena Al-Qur'an memberikan indikasi bahwa sedikit banyaknya rizki yang akan diperoleh seseorang merupakan ketentuan Allah. Seperti ditunjukkan oleh firman Allah SWT:

وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ فَلَمَّا الَّذِينَ فَضَّلُوا بَرَادِي رِزْقِهِمْ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ أَفَبِعِزَّةِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ النحل: ٧١

"Dan Allah melebihkan sebahagian kamu dari sebahagian yang lain dalam hal rezki, tetapi orang-orang yang dilebihkan (rezkinya itu) tidak mau memberikan rezki mereka kepada budak-budak yang mereka miliki, agar mereka sama (merasakan) rezki itu. Maka mengapa mereka mengingkari ni`mat Allah?"³

Sudah lama masalah pembangunan pedesaan merupakan topik pembahasan dan objek penelitian para ahli, perencana, dan pejabat-pejabat pemerintah di banyak negara. Masalah ini kadang-kadang secara

³ Q.S. An-Nahl (16):71

langsung dikaitkan dengan pembangunan pertanian. Sementara itu, kemiskinan pedesaan (*rural poverty*) juga hampir menjadi topik yang tidak mungkin dilepaskan dari masalah pembangunan pedesaan, karena di banyak negara berkembang, sebagian besar penduduk miskin tinggal di daerah pedesaan. Hal ini menjadi lebih menonjol lagi setelah banyak negara berkembang melaksanakan program-program pembangunan ekonomi yang cenderung bersifat mendahulukan kepentingan penduduk perkotaan.

Melalui program-program pembangunan ekonomi, pendapatan, tingkat hidup, dan mutu kehidupan masyarakat perkotaan meningkat sangat cepat meninggalkan kelompok penduduk di daerah pedesaan. Hasilnya, keadaan kemiskinan perkotaan banyak berkurang. Namun, tidak demikian halnya bagi masyarakat pedesaan.

Bagi bangsa Indonesia, kemiskinan telah menjadi permasalahan tersendiri yang tak kunjung selesai, apalagi ekonomi rakyat Indonesia dewasa ini berada di persimpangan jalan. Potensinya untuk berkembang sebenarnya semakin terbuka, karena seluruh bangsa sudah sangat menyadari perlunya pemerataan sebagai prakondisi perwujudan keadilan sosial. Artinya, ekonomi rakyat kecil yang selama ini banyak “tergusur” perlu benar-benar digarap dan dikembangkan.

Dalam pada itu, munculnya kelompok ekonomi yang kuat merupakan peluang sekaligus masalah, karena di samping peranan ekonomi mereka bagi pertumbuhan, mereka juga berpotensi untuk menyedot segala hasil pertumbuhan ekonomi nasional.

Di Indonesia, persentase penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan menurun cukup cepat di kota-kota, tetapi tidak begitu cepat di daerah pedesaan. Kesulitan mengenyahkan kemiskinan di pedesaan telah mendorong pemerintah banyak negara berkembang untuk mencari aneka rupa upaya yang lebih efektif, baik dengan pendekatan-pendekatan *top down* (dari atas), maupun *bottom up* (dari bawah), termasuk di dalamnya pendekatan pembangunan desa terpadu.⁴

Di Indonesia, pemerintah memperkenalkan program-program subsidi desa, dan bantuan kepada kabupaten untuk membantu merehabilitasi dan membangun prasarana ekonomi, dan prasarana produksi di daerah pedesaan, misalnya dengan program Inpres Desa Tertinggal (IDT), Jaring Pengaman Sosial (JPS), dan lainnya. Namun, persoalan kemiskinan pedesaan masih tetap menjadi momok yang belum ditemukan formulanya untuk mengenyahkan.

⁴ Mubyarto, dkk., *Nelayan dan Kemiskinan*, Cet. I (Jakarta: Rajawali, 1984), hal. 1-2.

Dalam studi ini akan dikemukakan mendetail bagaimana program-program pembangunan pedesaan selama 10 tahun terakhir telah memberikan pengaruh langsung pada kehidupan masyarakat pedesaan, khususnya masyarakat miskin. Dalam profil keluarga digambarkan pengaruh ini pada berbagai kelompok masyarakat, baik kelompok atas maupun termiskin. Ternyata pengaruh sosol-ekonomi ini belum seragam pada semua lapisan. Di samping ada yang kesejahteraannya amat meningkat masih ditemukan keluarga-keluarga yang boleh dikatakan sedikit sekali berubah sejak gerakan pembangunan belum dimulai.

Selama ini pembangunan pedesaan didekati melalui pendekatan *top down* dan *bottom up*. Pendekatan *top down* yang biasanya dikenal sebagai teori "tetesan ke bawah" (*trickle down*) sudah dianggap kurang mengena, sehingga banyak ditinggalkan para ahli. Pendekatan *bottom up* banyak dianjurkan, tetapi dalam kenyataannya sukar dilaksanakan, karena tidak terlalu mudah memasukkannya ke dalam program pembangunan ekonomi makro yang bersifat nasional. Walaupun di sana sini sudah dilakukan studi-studi untuk menyiapkan proyek-proyek pembangunan pedesaan, namun akhirnya hasil-hasilnya kurang dapat dimanfaatkan.

Salah satu masalah yang paling sulit adalah apa yang biasanya disebut faktor-faktor kelembagaan. Di satu pihak penentu kebijaksanaan biasanya sudah mampu menangkap berbagai aspirasi atau keinginan masyarakat terlemah di pedesaan, sehingga secara tepat aspirasi-aspirasi tersebut berhasil dimasukkan ke dalam program-program pembangunan nasional. Namun, pada saat kebijaksanaan dan program-program tersebut hendak dilaksanakan ternyata ada pihak-pihak yang lebih dulu, dan lebih mampu "memanfaatkan" program-program tersebut. Ini berarti, bahwa program-program tersebut ada tetapi manfaatnya tidak sampai pada sasaran yang telah ditentukan.

Demikianlah tujuan ekonomi-antropologi ini dimaksudkan untuk meneliti, bagaimana kebijaksanaan dan program-program, dan proses pembangunan yang telah dilaksanakan dalam dua atau tiga dekade terakhir di berbagai negara dan masyarakat telah mempengaruhi mutu kehidupan dari berbagai kelompok masyarakat di pedesaan, dan apa bentuk dan sifat hasil tersebut.

Dengan tujuan tersebut, penelitian ini ingin mengungkapkan kaitan antara petani dan kemiskinan. Dalam hal ini, bagaimana pemahaman petani tentang kemiskinan, dan bagaimana mereka berupaya mengentaskan kemiskinan tersebut menuju tingkat kesejahteraan yang

memadai. Sebab, biasanya studi-studi yang sering dilakukan cenderung bersifat parsial, yakni memisahkan antara keduanya. Untuk itu, dalam studi ini dicoba dipadukan antara keduanya, terutama untuk lebih mengekspresikan pemahaman mereka selama ini tentang kemiskinan.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, kiranya penelitian ini cukup menarik untuk dilaksanakan, terutama mengenai petani dan kemiskinan dilihat dari pendekatan ekonomi-antropologi dan agama. Adapun yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah para petani di Kecamatan Singaparna, yang dikenal sebagai daerah pinggiran kota Tasikmalaya, Propinsi Jawa Barat.

B. Rumusan Masalah

Beranjak dari latar belakang masalah di atas, yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah persepsi masyarakat petani pedesaan di Kecamatan Singaparna tentang kemiskinan dilihat dari pemenuhan kebutuhan sandang, pangan, perumahan, pendidikan dan kesehatan?
2. Bagaimanakah upaya petani miskin pedesaan dalam meningkatkan kesejahteraan keluarganya dilihat dari pemenuhan kebutuhan sandang, pangan, perumahan, pendidikan dan kesehatan?

3. Kendala-kendala apa yang dihadapi oleh petani miskin pedesaan di Kecamatan Singaparna dalam meningkatkan kesejahteraannya dilihat dari pemenuhan kebutuhan sandang, pangan, perumahan, pendidikan dan kesehatan?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan permasalahan penelitian tersebut di atas, tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Menggali informasi mengenai persepsi masyarakat petani pedesaan di Kecamatan Singaparna tentang kemiskinan dilihat dari pemenuhan kebutuhan sandang, pangan, perumahan, pendidikan dan kesehatan.
2. Menggali informasi mengenai upaya petani miskin pedesaan dalam meningkatkan kesejahteraan keluarganya dilihat dari pemenuhan kebutuhan sandang, pangan, perumahan, pendidikan dan kesehatan.
3. Menggali informasi mengenai kendala-kendala yang dihadapi oleh petani miskin pedesaan di Kecamatan Singaparna dalam meningkatkan kesejahteraannya dilihat dari pemenuhan kebutuhan sandang, pangan, perumahan, pendidikan dan kesehatan.

Adapun kegunaan dari hasil penelitian tesis ini adalah:

1. Untuk memberikan kontribusi dalam perkembangan khazanah keilmuan, khususnya mengenai kondisi petani dan kemiskinan dilihat dari aspek ekonomi-antropologi.
2. Untuk memberikan informasi kepada para petani miskin, tentang pentingnya upaya meningkatkan kesejahteraan keluarga melalui pemanfaatan program-program dan kebijaksanaan pemerintah.
3. Untuk memberikan informasi kepada Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya serta instansi terkait mengenai kaitan antara petani dan kemiskinan, serta upaya mereka dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga.

D. Telaah Pustaka

Studi-studi tentang kemiskinan telah banyak dilakukan oleh para ahli. Ada yang menyorotinya dari aspek ekonomi, sosial-budaya, agama, filsafat, antropologi, dan lainnya. Sebut saja penelitian yang dilakukan Mubyarto, M. Dawam Rahardjo, Ahmad Muflih Saefuddin⁵, dan lainnya.

⁵ Mubyarto tentang *Nelayan dan Kemiskinan* dilihat dari aspek Ekonomi Antropologi; Dawam Rahardjo tentang *Islam dan Kemiskinan* dilihat dari aspek agama; dan Ahmad Muflih Saefuddin tentang *Etos Kerja Islam*.

Umumnya studi-studi yang mereka lakukan cenderung bersifat parsial, memisahkan antara topik yang satu dengan lainnya. Misalnya, hanya menyoroti masalah kemiskinan, atau menyoroti faktor-faktor penyebabnya saja. Kalaupun ada yang bersifat komprehensif seperti penelitian Mubyarto, cenderung melihat aspek kemiskinan dari sudut ekonomi.

Studi-studi yang banyak dilakukan sebelumnya mengenai pembangunan pedesaan biasanya lebih menyoroti perekonomian desa. Hasil-hasil yang dicapai antara lain berupa gambaran tentang kondisi kehidupan sosial-ekonomi, keadaan pemenuhan kebutuhan pokok penduduk, tingkat produksi dan fasilitas pemasaran komoditi yang dihasilkan penduduk, dan prospek kehidupan desa pada umumnya.

Dalam studi tentang petani dan kemiskinan, fokus perhatian diarahkan tidak pada perekonomian desa, tetapi pada manusia desa. Oleh karena itu, hasil pembangunan pedesaan tidak semata-mata diartikan sebagai peningkatan produksi, penyempurnaan pemasaran, atau diversifikasi dalam perekonomian desa, akan tetapi lebih bersifat komprehensif, yang mencakup spektrum kemanusiaan yang luas. Tujuan dan hasil akhir dari pendekatan yang demikian adalah pembangunan manusia seutuhnya di pedesaan, yaitu kemajuan yang mantap dan terus

menerus dalam kondisi kehidupan yang mengandung unsur-unsur kebebasan, kebahagiaan, dan keamanan bagi seluruh anggota masyarakat.

Berdasarkan kenyataan itu, penelitian ini akan diarahkan pada studi yang komprehensif antara petani dan kemiskinan, yang dilihat dari pendekatan ekonomi-antropologi. Hal ini dimaksudkan untuk melihat kemiskinan petani pedesaan dari berbagai unsur, tidak hanya ekonomi, tetapi lebih dari itu adalah dari aspek antropologi, atau aspek kemanusiaannya.



E. Kerangka Teori

Minimal ada tiga teori yang digunakan untuk menganalisa persoalan dalam penelitian ini, yaitu petani, kemiskinan dan kesejahteraan. Ketiga teori tersebut pada akhirnya akan bermuara pada masalah bagaimana upaya petani miskin meningkatkan kesejahteraannya.

Teori pertama yang perlu dikembangkan adalah tentang petani. Menurut Bintarto⁶, kurang lebih 65% penduduk Indonesia bekerja di bidang pertanian. Keadaan ini dimungkinkan karena kesuburan tanah dan iklim yang mendukung berkembangnya tanaman pertanian. Bahkan

⁶ Bintarto, R., *Interaksi Desa-Kota dan Permasalahannya*, Cet. IV (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994), hal. 13.

menurut Soerjono Soekanto⁷, penduduk masyarakat pedesaan pada umumnya hidup dari pertanian, walaupun terlihat adanya tukang kayu, tukang genteng dan bata, tukang membuat gula dan bahkan tukang ijon, akan tetapi inti pekerjaan penduduk adalah pertanian. Pekerjaan-pekerjaan di samping pertanian hanya merupakan pekerjaan sampingan saja.

Jadi, petani adalah penduduk pedesaan yang pekerjaan pokoknya adalah dalam bidang pertanian. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh Eric R. Wolf⁸ bahwa petani adalah orang yang pekerjaannya bercocok-tanam di pedesaan.

Kebiasaan yang menonjol dari kehidupan petani yaitu bersawah atau bercocok-tanam. Para petani yang hendak bertanam padi di tanah sawah yang perlu diiri melakukan bermacam-macam pekerjaan yang berhubungan dengan usaha itu. Bagi petani, air sungai yang mengandung lumpur lebih penting daripada tanah. Pada hari-hari tertentu dalam setahun akan terlihat masing-masing keluarga petani selalu bekerja keras seolah-olah tak ada hentinya, mulai dari mengetam

⁷ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Cet. XVIII (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994), hal. 167.

⁸ Wolf, *Peasant*, Cet. I (New Jersey: Prentice-Hall, 1966), hal. 4.

dan menumbuk padi, mencari ikan, menenun, menjahit pakaian, memperbaiki perkakas kayu dan perkakas besi, mengobrol, memasak, merayakan hari jadi atau berkabung pada waktu kematian, merawat orang sakit, mengasuh anak, sampai kepada bercinta dan berkasih-kasihan.⁹

Kroeber sebagaimana dikutip oleh Schoorl¹⁰ menyebutkan tentang kaum tani di pedesaan. Menurutnya, kaum tani adalah jelas-jelas penduduk pedesaan. Akan tetapi hidup mereka berhubungan dengan kota tempat pemasaran. Mereka merupakan suatu kelas yang menjadi bagian dari penduduk yang lebih luas, yang biasanya juga meliputi pusat-pusat perkotaan dan kadang-kadang ibukota metropolitan. Mereka itu hanya merupakan sebagian masyarakat dengan sebagian kebudayaan. Mereka itu tidak memiliki isolasi dan otonomi politik suku-suku yang dapat memenuhi kebutuhannya sendiri, akan tetapi kesatuan lokal mereka tetap memiliki identitasnya yang lama, integrasinya dan ikatannya dengan tanah dan upacara.

⁹ David J. Steinberg, *"Alam Kehidupan Petani"*, dalam Sartono Kartodirdjo, *Elite dalam Perspektif Sejarah*, Cet. I (Jakarta: LP3ES, 1981), hal. 1-2.

¹⁰ Schoorl, J.W., *Modernisasi: Pengantar Sosiologi Pembangunan Negara-negara Sedang Berkembang*, Terjemahan Sukadijo R.G., Cet. IV (Jakarta: Gramedia, 1984), hal. 98.

Ciri-ciri kehidupan masyarakat petani pedesaan di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Rentan terhadap konflik dan persaingan. Sebab, mereka selalu hidup berdekatan dengan orang-orang lain sebagai tetangganya secara terus menerus. Pertengkaran sering terjadi sekitar peristiwa-peristiwa dalam kehidupan sehari-hari dalam rumah tangga, sekitar masalah tanah, masalah kedudukan dan gengsi, masalah perkawinan, sekitar perbedaan kaum tua dan kaum muda, dan sekitar perbedaan antara pria dan wanita.
2. Pekerjaan yang mereka geluti sebagai petani dimaksudkan sebagai upaya mereka untuk menciptakan ketenteraman.
3. Sistem tolong-menolong di kalangan petani sangat kuat. Kompensasi tolong-menolong bukan bagian dari hasil pekerjaannya dan juga bukan upah, tetapi tenaga bantuan juga.
4. Memiliki jiwa gotong royong yang sangat kuat sebagai pengejawantahan dari sistem tolong-menolong.
5. Mengedepankan musyawarah dalam memecahkan setiap permasalahan yang berkembang.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa petani adalah sekelompok orang atau masyarakat yang hidup di wilayah pedesaan, bermata pencaharian di bidang pertanian, dan sebagai penduduk terbesar di Indonesia. Dengan demikian, ciri khas petani adalah mata pencahariannya di bidang pertanian.

¹¹ Sajogyo dan Pudjiwati Sajogyo, *Sosiologi Pedesaan*, Jilid II, Cet. III (Jakarta: Gadjahmada University Press, 1983), hal. 34-41.

Menurut Hamzah Yaqub¹², dalam ajaran Islam, pertanian merupakan salah satu mata pencaharian yang paling baik, karena di samping merupakan kerja tangan sendiri, mengandung sifat tawakkal, juga karena berguna bagi manusia dan makhluk lain.

Selain teori tentang petani, teori lainnya dalam tulisan ini adalah berkaitan dengan kemiskinan. Kemiskinan merupakan salah satu problem sosial yang amat serius. Menurut Soerjono Soekanto¹³, yang dimaksud dengan kemiskinan adalah suatu keadaan di mana seseorang tidak sanggup memelihara dirinya sendiri sesuai dengan taraf kehidupan kelompok dan juga tidak mampu memanfaatkan tenaga mental maupun fisiknya dalam kelompok tersebut.

Dalam pandangan Masjfuk Zuhdi¹⁴ kategori orang miskin terbagi menjadi dua, yaitu sebagai berikut:

1. Orang miskin adalah orang yang masih mampu bekerja/berusaha dan bisa mencukupi kebutuhan hidupnya, tetapi ia kekurangan modal usaha/bekerja.
2. Orang miskin adalah orang yang tidak/belum mampu bekerja/berusaha, seperti orang yang lanjut usia, anak yatim, janda, penyandang cacat fisik atau mental.

¹² Hamzah Yaqub, *Etos Kerja Islami*, Cet. I (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1992), hal. 30.

¹³ Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, hal. 406.

¹⁴ Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, Cet. IV (Jakarta: Haji Mas Agung, 1993), hal. 257.

Kemudian, untuk memahami makna kemiskinan, minimal ada tiga konsep kemiskinan, yaitu sebagai berikut:

1. Kemiskinan absolut, yaitu kemiskinan yang diukur berdasarkan ukuran pada orientasi kebutuhan hidup dasar minimum anggota masyarakat seperti sandang, pangan dan papan.
2. Kemiskinan relatif, yaitu kemiskinan yang didasarkan atas gagasan standar relatif kehidupan manusia dilihat dari dimensi tempat dan waktu. Dasar asumsinya adalah kemiskinan di suatu daerah berbeda dengan daerah lain, dan kemiskinan pada waktu tertentu berbeda dengan waktu yang lain. Ukurannya adalah pertimbangan anggota masyarakat tertentu dengan berorientasi pada derajat kelayakan hidup.
3. Kemiskinan subyektif, yaitu kemiskinan yang dirumuskan berdasarkan perasaan kelompok miskin itu sendiri. Artinya, bisa saja orang yang tidak layak kehidupan ekonominya tidak mau dianggap miskin.

Pemahaman tentang kemiskinan juga dapat didekati dalam dua perspektif, yaitu perspektif kultural dan perspektif struktural atau situasional. Perspektif kultural mendekati masalah kemiskinan pada tingkat analisis, yaitu: individual, keluarga dan masyarakat. Pada tingkat individual, kemiskinan ditandai dengan sikap parokial, apatisme, fatalisme atau pasrah pada nasib, boros, tergantung dan inferior. Pada tingkat keluarga, kemiskinan ditandai dengan jumlah anggota keluarga yang besar. Dan pada tingkat masyarakat, kemiskinan terutama ditunjukkan oleh tidak terintegrasinya kaum miskin dengan institusi-institusi

¹⁵ Sunyoto Usman, *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*, Cet. II (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), hal. 125-126.

masyarakat secara efektif. Sedangkan menurut perspektif situasional atau struktural, masalah kemiskinan dilihat sebagai dampak dari sistem ekonomi yang mengutamakan akumulasi kapital dan produk-produk teknologi modern.¹⁶

Terlepas dari hal itu semua, maka kemiskinan merupakan suatu persoalan yang dihadapi oleh bangsa-bangsa dunia ketiga atau bangsa modern, termasuk di Indonesia. Persoalan ini tentu saja perlu ditanggulangi secara simultan menyeluruh dengan melihat akar persoalannya.

Penanggulangan masalah kemiskinan telah banyak dilakukan oleh berbagai pihak. Pemerintah Indonesia sendiri telah melakukan penanggulangan kemiskinan dengan mencanangkan dua kebijakan pokok pembangunan, yaitu: (1) mengurangi jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan; dan (2) melaksanakan delapan jalur pemerataan yang meliputi pemerataan pembagian pendapatan, penyebaran pembangunan di seluruh daerah, kesempatan memperoleh pendidikan,

¹⁶ Sunyoto Usman, *Ibid.*, hal. 128.

kesehatan, kesempatan kerja, berusaha, berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan dan kesempatan memperoleh keadilan.¹⁷

Namun demikian, upaya-upaya menanggulangi kemiskinan sampai saat ini masih dinilai belum berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Kemiskinan belum berkurang dan isu-isu ketimpangan masalah semakin deras mencuat ke permukaan.

Dalam ajaran Islam, masalah kemiskinan memang diakui. Menurut ajaran Islam¹⁸, yang dimaksud dengan orang miskin adalah orang yang berjuang mencari penghidupan tetapi pendapatannya tidak mencukupi kebutuhannya.

Islam mengajarkan, salah satu cara menanggulangi kemiskinan adalah dengan konsep sistem zakat. Sebab zakat bisa menjadi sumber dana tetap yang potensial yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan ummat manusia, terutama kaum fakir miskin, sehingga mereka bisa hidup layak secara mandiri tanpa menggantungkan nasibnya atas belas kasihan orang lain.¹⁹

¹⁷ Sunyoto Usman, *Ibid.*, hal. 130.

¹⁸ Zainal Abidin Ahmad, *Dasar-dasar Ekonomi Islam*, Cet. I (Jakarta: Bulan Bintang, 1979), hal, 128.

¹⁹ Masjfuk Zuhdi, *Op. Cit.*, hal. 235.

Jadi, inti upaya penanggulangan kemiskinan adalah dengan cara meningkatkan kesejahteraan kaum miskin. Kesejahteraan ini merupakan lawan dari kemiskinan. Menurut Mubyarto,²⁰ kesejahteraan diartikan sebagai perasaan hidup yang senang dan tenteram tidak kurang suatu apa, dalam batas-batas yang mungkin dicapai orang seorang.

Kesejahteraan yang dikehendaki adalah kesejahteraan yang komprehensif, yaitu tidak hanya perasaan kesejahteraan materiil saja, akan tetapi juga mencakup unsur kejiwaan, yaitu rasa tenteram lahir dan batin, termasuk di dalamnya perasaan memperoleh keadilan dalam kehidupan, sehingga tidak ada yang patut menimbulkan rasa iri hati. Sudah jelas, dalam hal terpenuhinya rasa keadilan ini, orang harus benar-benar terlepas dari kemiskinan yang menyiksa, dan terlepas dari bahaya kemiskinan yang mengancam.

Menurut Mubyarto dan kawan-kawan,²¹ unsur kehidupan yang bebas, bahagia dan aman, mencakup komponen-komponen sebagai berikut:

1. Mutu kehidupan fisik
2. Mata pencaharian
3. Individualitas dan kebebasan memilih
4. Pengembangan diri
5. Perkembangan sosial-politik.

²⁰ Mubyarto, *Op. Cit.*, hal. 1.

²¹ Mubyarto, dkk., *Nelayan dan Kemiskinan*, Cet. I (Jakarta: Rajawali, 1984), hal. 8.

Mutu kehidupan fisik ditandai oleh adanya peningkatan mutu kehidupan fisik yang meliputi mutu lingkungan fisik, pola konsumsi dan pemenuhan kebutuhan fisik manusia, dan rasa aman dari gangguan-gangguan luar lain yang bersifat fisik.

Mata pencaharian ditandai dengan semakin mudahnya penduduk dalam mendapatkan nafkah bagi dirinya dan keluarganya. Adapun individualitas dan kebebasan memilih ditandai dengan adanya kenaikan dari bagian penduduk yang mampu menentukan sendiri hari depannya, dan hari depan anak-anaknya, dengan sekaligus ada kecenderungan makin berkurangnya konflik kepentingan antar individu. Dalam hal ini termasuk semakin besarnya peranan wanita dan anak-anak dalam peningkatan mutu kehidupan sehari-hari.

Pengembangan diri ditandai dengan adanya peningkatan dalam jumlah orang yang makin menyadari peranan lingkungannya, makin mengetahui bagaimana menambah keterampilannya, hak-haknya, dan kesempatan-kesempatannya, dan dalam kesadarannya atas kewajiban-kewajiban sosial dan tanggung-jawabnya.

Kemudian perkembangan sosial dan politik, ditandai dengan adanya pertambahan dalam jumlah orang yang semakin mampu ikut

serta secara aktif dalam pengambilan keputusan yang menyangkut nasib mereka.

Dengan demikian, secara materiil, keluarga yang sejahtera adalah keluarga yang tercukupi sandang pangannya, pakaian, dan rumah al kadarnya, yang biasa membuat orang kerasan tinggal di rumah, kesehatan terpelihara, dan anak-anak dapat bersekolah atau memperoleh pendidikan yang diharapkannya. Tetapi, lebih dari perasaan kesejahteraan materiil tersebut, kesejahteraan juga menyangkut unsur kejiwaan, yaitu rasa tenteram lahir dan batin, termasuk di dalamnya perasaan memperoleh keadilan dalam kehidupan, sehingga tidak ada yang patut menimbulkan rasa iri hati.

Kaitan dengan masalah pencapaian terhadap kesejahteraan, Islam memperkenalkan tujuannya yang tertumpu kepada lima pokok tuntunannya, yaitu:

1. Pemeliharaan agama
2. Pemeliharaan jiwa
3. Pemeliharaan akal
4. Pemeliharaan keturunan
5. Pemeliharaan harta²².

²² Muhammad Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, Cet. IV (Bandung: Mizan, 1994), hal. 291.

Bahkan Islam mengajarkan, bahwa untuk mewujudkan suatu kesejahteraan, umat Islam diperintahkan untuk terus berjuang (Q.S. Al-Ma'idah:35), yakni dengan cara melakukan perubahan-perubahan dalam pola kehidupan (Q.S. Ar-Ra'd:11).

Namun yang paling penting, kesejahteraan yang akan dicapai menurut ajaran Islam adalah kesejahteraan lahir batin, yang di dalamnya diliputi dengan kebahagiaan (*sakinah*), cinta kasih (*mawaddah*), dan penuh rasa sayang (*rahmah*) (Q.S. An-Nur:21).

Keluarga adalah unit terkecil yang membentuk masyarakat dan negara, tujuan pembentukan keluarga menurut ajaran Islam adalah untuk menciptakan kesejahteraan dan kebahagiaan (Q.S. 30:21). Jika masyarakat suatu negara mencapai kebahagiaan, maka negara tersebut termasuk ke dalam *baladah tayyibah* (Q.S. 34:15).

Jadi, kesejahteraan yang didambakan oleh Islam adalah ditandai dengan terpenuhinya unsur-unsur sebagai berikut:

1. Anggota keluarga kesemuanya menjalankan tugas-tugasnya dengan baik dalam arti bahwa ayah, ibu dan anak semuanya berkualitas.
2. Kecukupan dalam bidang material yang diperoleh dengan cara yang tidak terlalu memberatkan jasmani atau ruhani.²³

²³ Muhammad Quraish Shihab, *Ibid*, hal. 292.

Berhubung dengan adanya berbagai unsur di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pembangunan manusia tidaklah hanya menyangkut satu atau lebih faktor-faktor tertentu, akan tetapi merupakan akibat dari bekerjanya semua faktor sekaligus, yaitu kebijaksanaan dan program pemerintah, struktur ekonomi dan sosial, keadaan sumberdaya regional, perkembangan politik dan sejarah. Dalam hubungan ini pemerintah dengan kebijaksanaan dan program-programnya memegang kunci dan peranan sangat menentukan, suatu peranan yang membutuhkan tingkat campur tangan yang tepat atau optimum, tidak kurang dan tidak lebih.

Dengan demikian, konsepsi mendasar penelitian ini adalah ingin mengarahkan titik fokus pembangunan pedesaan dan pembangunan nasional, diarahkan pada pembangunan manusianya. Dalam model ini, peranan pemerintah di samping mengarahkan dan mendorong pembangunan nasional dan pembangunan pedesaan, harus pula mampu secara langsung menyentuh manusianya. Inilah hakikat pembangunan yang diharapkan.

F. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan mengambil lokasi di dua desa wilayah Kecamatan Singaparna

Kabupaten Tasikmalaya, yaitu Desa Cipakat dan Desa Cikunir. Alasan dipilihnya dua desa tersebut sebagai lokasi penelitian adalah berdasarkan pertimbangan pribadi dilihat dari kategori desa yang sangat miskin dilihat dari aspek sandang, pangan, papan, kesehatan, dan pendidikan.

Jenis data yang dikumpulkan meliputi: (1) data tentang persepsi masyarakat petani pedesaan di Kecamatan Singaparna tentang kemiskinan dilihat dari pemenuhan kebutuhan sandang, pangan, perumahan, pendidikan dan kesehatan; (2) data tentang upaya petani miskin pedesaan dalam meningkatkan kesejahteraan keluarganya dilihat dari pemenuhan kebutuhan sandang, pangan, perumahan, pendidikan dan kesehatan; dan (3) Kendala-kendala apa yang dihadapi oleh petani miskin pedesaan di Kecamatan Singaparna dalam meningkatkannya dilihat dari pemenuhan kebutuhan sandang, pangan, perumahan, pendidikan dan kesehatan.

2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah survei. Menurut Masri Singarimbun dan Sofian Effendi,²⁴ dalam survei informasi dikumpulkan dari responden dengan menggunakan kuesioner. Umumnya, pengertian survei

²⁴ Masri Singarimbun dan Sofien Effendi (Penyunting), *Metode Penelitian Survei*, Cet. VIII (Jakarta: LP3ES, 1987), hal. 8.

dibatasi pada pengertian survai sampel ketika informasi dikumpulkan dari sebagian populasi untuk mewakili seluruh populasi.

Kemudian dari sudut ruang lingkup, penelitian survai mencakup empat aspek, yaitu: ciri demografis dari masyarakat, lingkungan sosial mereka, aktivitas mereka, dan pendapat serta sikap mereka.²⁵

Berdasarkan ketentuan tersebut, dalam penelitian ini data yang dikumpulan adalah ciri-ciri demografis petani miskin di Kecamatan Singaparna, lingkungan sosial petani miskin, aktivitas pertanian mereka, dan pendapat serta sikap petani terhadap kemiskinan, dan upaya mereka dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga.

3. Populasi dan Sampel

Menurut Suharsimi Arikunto²⁶, yang dimaksud dengan populasi adalah keseluruhan subjek penelitian. Hal senada juga dikatakan oleh Winarno Surakhmad²⁷ bahwa populasi adalah sejumlah subjek yang diteliti.

²⁵ Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, *Ibid.*, hal. 8.

²⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, Cet. IV (Jakarta: Bina Aksara, 1993), hal. 102.

²⁷ Winarno Surakhmad, *Dasar-dasar Penelitian*, Cet. XIII (Bandung: Tarsito, 1990), hal. 93.

Berdasarkan pengertian tersebut, maka yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat petani miskin yang ada di Kecamatan Singaparna, terutama mereka yang berada di Desa Cipakat dan Desa Cikunir.

Sedangkan sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti²⁸. Dalam penelitian ini yang menjadi sampel adalah masyarakat petani miskin yang adalah Desa Cipakat dan Desa Cikunir. Alasannya adalah karena kedua desa tersebut termasuk desa IDT dengan kategori desa miskin dibandingkan dengan 22 desa lainnya yang ada di Kecamatan Singaparna.

Adapun pengambilan sampel dilakukan dengan cara *Purposive Sampling*. Menurut Marzuki²⁹ bahwa teknik *Purposive Sampling* yaitu teknik pengambilan sampel yang dilakukan dengan cara pengambilan elemen-elemen yang dimasukkan dalam sampel secara sengaja, dengan catatan bahwa sampel tersebut representatif atau mewakili ciri-ciri populasi.

²⁸ Suharsimi Arikunto, *Op. Cit.*, hal. 104.

²⁹ Marzuki, *Metodologi Riset*, Cet. IV (Yogyakarta: BPFE-UII, 1986), hal. 51.

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka yang menjadi ciri khas sampel adalah masyarakat petani miskin dilihat dari kategori kurangnya pemenuhan kebutuhan masyarakat setempat terhadap sandang, papan, pangan, pendidikan, dan kesehatan.

Kemudian, berkaitan dengan penentuan besar kecilnya jumlah sampel penelitian, Sudjana³⁰ mengatakan sebagai berikut:

Tidak ada ketentuan yang baku atas atau rumus yang pasti, sebab keabsahan sampel terletak pada sifat dan karakteristiknya mendekati populasi atau tidak, bukan pada besar atau kecilnya jumlah. Minimal sampel sebanyak 30 subjek. Ini berdasarkan atas perhitungan atau pengujian yang lazim digunakan dalam statistika. Pendapat lain ialah, terhadap populasi kurang dari 100 biasa diambil 20%-50%. Patokan tersebut bukan standard baku, melainkan hanya perkiraan berdasarkan pertimbangan praktis.

Berdasarkan pertimbangan di atas, penentuan jumlah sampel dalam penelitian ini dilihat dari besarnya penduduk miskin di dua wilayah pedesaan yang termasuk kategori desa IDT di Kecamatan Singaparna, yaitu Desa Cipakat dan Desa Cikunir. Adapun banyaknya sampel yang diambil secara sengaja (*purposive*) adalah sebanyak 100 orang yang masing-masing desa (dua desa) diambil 50 orang petani miskin.

³⁰ Sudjana, *Metode Statistik*, Cet. VIII (Bandung: Tarsito, 1988), hal. 72.

Pengambilan sampel terhadap dua desa tersebut dianggap representatif mewakili kategori desa yang banyak petani miskinnya, karena mengingat kedua desa tersebut termasuk kategori IDT.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data di lapangan yang paling utama adalah angket/kuesioner, dan ditunjang dengan wawancara, observasi serta dokumenter. Pada tingkat teoretis, pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan.

Angket maksudnya adalah pengumpulan data di lapangan dengan jalan menyebarkan beberapa pertanyaan secara tertulis kepada 100 orang responden yang telah ditentukan sebelumnya. Pertanyaan angket berkisar sekitar masalah-masalah: (1) persepsi masyarakat petani pedesaan di Kecamatan Singaparna tentang kemiskinan dilihat dari pemenuhan kebutuhan sandang, pangan, perumahan, pendidikan dan kesehatan; (2) upaya petani miskin pedesaan dalam meningkatkan kesejahteraan keluarganya dilihat dari pemenuhan kebutuhan sandang, pangan, perumahan, pendidikan dan kesehatan; dan (3) kendala-kendala yang dihadapi oleh petani miskin pedesaan di Kecamatan Singaparna dalam meningkatkan kesejahteraannya dilihat dari pemenuhan kebutuhan sandang, pangan, perumahan, pendidikan dan kesehatan.

Kemudian observasi dilakukan untuk mengetahui kondisi objektif daerah penelitian yang dilakukan dengan cara pengamatan secara langsung ke lokasi penelitian, yaitu Desa Cipakat dan Desa Cikunir. Sedangkan wawancara maksudnya adalah pengumpulan data dengan jalan mengadakan tanya jawab dengan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemerintahan, dan tokoh petani guna memperkuat data hasil angket.

Adapun studi kepustakaan maksudnya adalah pengumpulan data teoretis dengan cara menelaah beberapa literatur, terutama yang berkaitan dengan topik penelitian. Dokumenter maksudnya adalah pengumpulan data di lapangan dengan cara memanfaatkan dokumen-dokumen resmi, yang berasal dari Pemerintah Kecamatan Singaparna, Pemerintah Desa Cipakat, dan Pemerintah Desa Cikunir, terutama yang berkaitan dengan kondisi objektif penelitian dan upaya pengentasan kemiskinan.

5. Analisis Data

Setelah data tersebut dikumpulkan, langkah berikutnya adalah menganalisis data. Dalam analisis ini ada dua cara yang digunakan, yaitu analisis data kualitatif dan analisis data kuantitatif, baik terhadap data angket maupun hasil wawancara. Analisis data kualitatif diperoleh dari

hasil wawancara, dan dilakukan dengan cara menginventarisir data, mengklasifikasi data, membandingkan data, serta menyimpulkan data. Adapun analisis data kuantitatif, menggunakan pendekatan tabel-tabel frekuensi nonstatistik, dilakukan dengan cara membaca tabel-tabel, kemudian melakukan uraian dan penafsiran.³¹

Guna mengukur dan menghitung hasil nilai jawaban angket (a, b, c) dengan bobot penilaian sebagai berikut:

- Untuk alternatif jawaban (a) diberi skor 3
- Untuk alternatif jawaban (b) diberi skor 2
- Untuk alternatif jawaban (c) diberi skor 1

Berkaitan dengan penskoran tersebut, Sudjana³² menjelaskan sebagai berikut:

Setiap instrumen dapat digunakan untuk mengukur data kualitatif dan kuantitatif. Penelitian ilmu sosial dan ilmu pendidikan akhir-akhir ini banyak mengubah data kualitatif menjadi data kuantitatif melalui simbol-simbol angka. Sebagai contoh, kualitas barang yang termasuk paling baik diberi simbol angka 3, yang termasuk kategori sedang/cukup diberi simbol angka 2, dan yang termasuk jelek diberi simbol angka 1.

Berdasarkan patokan tersebut, maka nilai skor jawaban angket tertinggi dalam setiap itemnya adalah 3 dan terendah adalah 1. Dengan

³¹ Marzuki, *Metodologi Riset*, Cet. IV (Yogyakarta: BPFE-UII, 1986), hal. 87.

³² Sudjana, *Op. Cit.*, hal. 62.

demikian variasi skor nilai jawaban bergerak dari tertinggi (3) sampai terendah (1) mempunyai variasi kelas kategori sebesar:

$$\frac{3-1}{3} = 0,66$$

Jadi, tingkat kategori jawaban yang diperoleh responden untuk penilaian instrumen penelitian tentang: "Petani dan Kemiskinan (Upaya Petani dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga di Kecamatan Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya)" adalah sebagai berikut:

- 1,00 – 1,66: termasuk kategori **kurang**, yaitu petani miskin di Kecamatan Singaparna kurang atau belum berupaya meningkatkan kesejahteraan keluarganya.
- 1,67 – 2,33: termasuk kategori **cukup**, yaitu petani miskin di Kecamatan Singaparna sudah berupaya meningkatkan kesejahteraan keluarganya walaupun belum maksimal.
- 2,34 – 3,00: termasuk kategori **baik**, yaitu petani miskin di Kecamatan Singaparna sudah berupaya dengan baik dalam meningkatkan kesejahteraan keluarganya.

Kemudian untuk menghitung setiap alternatif jawaban angket digunakan rumus statistik yang berpedoman pada pendapat Sudjana³³ sebagai berikut:

$$\bar{X} = \sum \frac{f_i \cdot x_i}{f_i}$$

dimana:

$\bar{X}$ = rata – rata hitung

x_i = nilai jawaban

f_i = frekuensi nilai x_i yang sesuai

Rumus dan standar nilai kategori tersebut di atas juga digunakan untuk mengetahui nilai keseluruhan hasil penelitian.



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

G. Sistematika Pembahasan

Penulisan tesis yang berjudul: **PETANI DAN KEMISKINAN**

(Studi tentang Upaya Petani Miskin dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga di Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya), terdiri atas lima bab, yang masing-masing bab memiliki keterkaitan yang erat satu sama lain.

³³ Sudjana, *Ibid.*, hal. 62-63.

Bab Pertama merupakan bab pendahuluan, yang di dalamnya berisi pembahasan mengenai: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metodologi penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua berisi penjelasan teoretis mengenai persepsi masyarakat tentang kemiskinan dan kesejahteraan. Kemudian Bab ketiga merupakan penjelasan kondisi objektif daerah penelitian, yaitu Desa Cipakat dan Desa Cikunir, yang di dalamnya mencakup keadaan geografis, kependudukan, pendidikan, mata pencaharian, keagamaan, sosial-budaya, dan kesehatan.

Hasil dan pembahasan penelitian yang berkaitan dengan persoalan-persoalan penelitian ditempatkan pada bab keempat. Dalam bab ini dibahas mengenai: persepsi petani di Kecamatan Singaparna mengenai kemiskinan dilihat dari pemenuhan kebutuhan sandang, pangan, perumahan, pendidikan dan kesehatan, serta upaya petani miskin pedesaan dalam meningkatkan kesejahteraan keluarganya dilihat dari pemenuhan kebutuhan sandang, pangan, perumahan, pendidikan dan kesehatan, dan kendala-kendala yang dihadapi oleh petani miskin pedesaan di Kecamatan Singaparna dalam meningkatkan

kesejahteraannya dilihat dari pemenuhan kebutuhan sandang, pangan, perumahan, pendidikan dan kesehatan.

Tesis ini ditutup dengan penutup yang didalamnya berisi kesimpulan dan saran. Kemudian, untuk melengkapi penulisan tesis ini juga dicantumkan daftar pustaka dan lampiran-lampiran.



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

BAB II

PERSEPSI MASYARAKAT TENTANG KESEJAHTERAAN

A. Pengertian, Ciri-ciri dan Proses Terjadinya Persepsi

1. Pengertian Persepsi

Secara bahasa, kata *persepsi* berasal dari bahasa Inggris yaitu *perception* yang berarti pandangan, pendapat, atau penjelasan. Menurut Usman Effendi dan Juhaya S. Praja¹, makna persepsi adalah proses penerimaan, penafsiran dan memberi arti dari kesimpulan yang diperolehnya melalui alat dria.



Sarlito Wirawan² mengatakan bahwa persepsi merupakan kemampuan untuk membedakan, mengelompokkan, memfokuskan dan sebagainya terhadap objek yang ada di sekitarnya yang ditangkap melalui alat dria dan diproyeksikan pada bagian-bagian tertentu di otak.

Berkenaan dengan pengertian persepsi, Jalaluddin Rakhmat³ mengatakan bahwa persepsi adalah pengalaman tentang objek, peristiwa

¹ Usman Effendi dan Juhaya S. Praja, *Pengantar Psikologi*, Cet. I (Bandung: Angkasa, 1993), hal. 112.

² Sarlito Wirawan, *Pengantar Umum Psikologi*, Cet. I (Jakarta: Bulan Bintang, 1983), hal. 39.

³ Jalaluddin Rakhmat, *Psikologi Komunikasi*, Cet. IV (Bandung: Remadja Rosda Karya, 1994), hal. 51.

atau hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Dengan kata lain, persepsi menunjukkan pada suatu pemberian makna yang ditangkap oleh indra.

Hal senada juga dikatakan oleh Slameto⁴ bahwa persepsi adalah proses yang menyangkut masuknya pesan atau informasi ke dalam otak manusia. Dengan persepsi ini manusia terus menerus mengadakan hubungan dengan lingkungannya melalui alat indranya.

Dalam pengertian tersebut jelas bahwa persepsi berkaitan erat dengan upaya indra dalam menangkap objeknya. Indra manusia baik penglihatan, pendengaran atau perasaan akan selalu memberikan makna terhadap objek yang diterimanya. Pemberian makna inilah yang kemudian menghasilkan kesan baru, pengalaman baru, serta pengetahuan baru yang sebelumnya belum diperoleh individu. Oleh karena itu setiap individu dalam kehidupannya selalu akan bersentuhan dengan objek atau pengalaman yang akan menghasilkan suatu persepsi, yaitu suatu proses akhir dari suatu pandangan yang pada akhirnya akan menyebabkan adanya perubahan pada individu karena adanya pengertian baru yang dialaminya.

⁴ Slameto, *Belajar dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya*, Cet. I (Jakarta: Rienka Cipta, 1987), hal. 104.

Sedangkan menurut Kartini Kartono⁵ bahwa persepsi adalah bentuk pengalaman yang belum disadari benar sehingga individu bersangkutan belum mampu membedakan diri sendiri dengan objek yang dihayatinya.

Dalam pengertian di atas menunjukkan bahwa persepsi merupakan produk dari suatu kegiatan aktif atau respon atas stimulus yang menyentuh alat-alat indra sehingga menghasilkan suatu perasaan, motivasi atau bahkan sikap-sikap baik yang disadari ataupun tidak disadari.

Dari beberapa pengertian tersebut di atas tampaknya terdapat perbedaan dalam mengartikan persepsi, kendatipun tidak prinsip. Namun dari perbedaan pengertian tersebut terdapat kesamaan pemahaman bahwa persepsi merupakan suatu pengalaman tentang objek atau peristiwa sehingga menimbulkan kemampuan untuk membedakan, mengelompokkan, memfokuskan, mengenang pengalaman dengan proses pemberian makna terhadap objek sehingga meninggalkan kesan tentang objek itu, baik disadari ataupun tidak disadari.

⁵ Kartini Kartono, *Pengantar Psikologi*, Cet. I (Bandung: Mandar Maju, 1984), hal. 57.

2. Ciri-ciri Persepsi

Persepsi yang terjadi pada seseorang terhadap sesuatu objek pada hakikatnya memiliki perbedaan di antara individu yang satu dengan lainnya. Hal ini mengandung arti bahwa persepsi yang dialami seseorang memiliki ciri-ciri tertentu.

Menurut Slameto⁶ minimal ada lima ciri-ciri dari persepsi, yaitu sebagai berikut:

1. Persepsi itu bersifat relatif
2. Persepsi itu bersifat selektif
3. Persepsi mempunyai tatanan
4. Persepsi itu dipengaruhi oleh harapan dan kesiapan
5. Persepsi seseorang atau kelompok dapat jauh berbeda dengan persepsi orang atau kelompok lain sekalipun situasinya sama.

Berdasarkan pengertian di atas, maka ciri pertama persepsi adalah relatif. Yang dimaksud relatif di sini adalah bahwa persepsi seseorang dapat berubah-ubah. Suatu kesan yang menetap pada diri seseorang suatu saat akan berubah, terutama setelah individu itu memperoleh informasi atau pesan-pesan yang baru tentang objek yang diamatinya. Perubahan persepsi itu terjadi karena adanya perubahan struktur kognitif. Atau dengan kata lain, persepsi itu terjadi karena individu selalu belajar. Berkenaan dengan relativitas persepsi ini, maka dampak pertama

⁶ Slameto, *Op. Cit.*, hal. 105.

dari suatu perubahan rangsangan akan dirasakan lebih daripada rangsangan yang datang kemudian.

Ciri kedua persepsi adalah sifatnya relatif. Pesan atau informasi merupakan suatu perangsang yang dapat mempengaruhi persepsi. Dari sekian banyak perangsang yang datang, individu hanya memperhatikan beberapa perangsang saja. Rangsangan yang diterima akan tergantung dari apa yang dialami atau dipelajari, apa yang menarik perhatiannya, dan kearah mana persepsi itu mempunyai kecenderungan.

Ciri ketiga adalah persepsi mempunyai tatanan. Individu akan menerima rangsangan dalam bentuk hubungan atau kelompok-kelompok, apalagi kalau rangsangan yang diterimanya dirasakan kurang lengkap, maka ia akan berusaha melengkapi sendiri dalam bentuk yang lebih jelas.

Ciri keempat adalah bahwa persepsi itu dipengaruhi oleh harapan dan kesiapan. Harapan maupun kesiapan individu dalam menerima rangsangan sangat menentukan dalam proses persepsi. Hal ini mengandung arti rangsangan mana yang akan dipilih dan diterimanya. Selanjutnya rangsangan dipilih dan diinterpretasikan dalam bentuk yang dimengerti.

Ciri kelima dari persepsi adalah bahwa persepsi seseorang atau kelompok dapat jauh berbeda dengan persepsi orang atau kelompok lain, sekalipun situasinya sama.

3. Proses Persepsi

Persepsi adalah suatu proses yang menyangkut masuknya stimulus (rangsangan) ke dalam otak manusia melalui alat indra yang kemudian membentuk kesan-kesan, tanggapan-tanggapan dan perasaan senang atau tidak senang terhadap suatu objek. Hal ini sesuai dengan pendapat Bimo Walgito⁷ bahwa persepsi merupakan suatu proses yang didahului oleh penginderaan. Penginderaan adalah suatu proses diterimanya stimulus oleh individu melalui alat penerima, yaitu alat dria. Namun proses tersebut tidak berhenti di situ saja. Pada umumnya stimulus tersebut dilanjutkan oleh syaraf ke otak sebagai pusat susunan syaraf, dan seterusnya merupakan proses persepsi.

Adapun menurut Agus Sujanto⁸ bahwa proses persepsi melalui tiga saat, yaitu sebagai berikut:

1. Saat alami (saat physis), yaitu saat indra kita menerima perangsang dari luar.

⁷ Bimo Walgito, *Pengantar Psikologi Umum*, Cet. I (Yogyakarta: Offset, 1991), hal. 53.

⁸ Agus Sujanto, *Psikologi Umum*, Cet. I (Jakarta: Bina Aksara, 1989), hal. 21.

2. Saat jasmani (saat physiologis), yaitu saat perangsang itu diteruskan ke urat syaraf sensoris ke otak.
3. Saat rohani (saat psychis), yaitu saat sampainya perangsang itu ke otak, kita menyadari perangsang itu dan bertindak.

Pendapat di atas mengandung arti bahwa persepsi itu mengalami tiga proses, yaitu: penerimaan perangsang oleh alat indra, kemudian diteruskan oleh syaraf sensoris ke otak, kemudian melahirkan tindakan bersifat psikis.

Proses persepsi selanjutnya adalah sebagaimana dikatakan oleh Moenandar Soelaeman⁹ yaitu sebagai berikut:

1. Seleksi, yaitu proses penyaringan oleh indra terhadap rangsangan dari luar, intensitasnya dapat banyak atau sedikit.
2. Interpretasi, yaitu proses mengorganisasikan informasi sehingga mempunyai arti bagi seseorang. Interpretasi dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti pengalaman masa lalu, sistem nilai yang dianut, motivasi, kepribadian, kecerdasan, dan sebagainya.
3. Interpretasi dari persepsi kemudian diterjemahkan ke dalam bentuk tingkah laku sebagai reaksi.

Untuk mengetahui terjadinya persepsi pada individu, kiranya dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa bahwa proses terjadinya persepsi pada dasarnya karena adanya objek yang menimbulkan stimulus, melalui alat dria (*receptor*) stimulus diterima. Kemudian oleh stimulus itu dilanjutkan oleh syaraf sensoris ke otak. Di dalam otak

⁹ Moenandar Soelaeman, *Ilmu Sosial Dasar: Teori dan Konsep Ilmu Sosial*, Cet. I (Bandung: Eresco, 1992), hal. 14.

stimulus mengalami suatu proses pengorganisasian yang pada akhirnya individu menyadari benar apa yang diterima oleh alat inderanya dalam bentuk reaksi tingkah laku. Oleh karena itu bila persepsi individu mengenai objek yang diterimanya itu baik, maka hasil proses pengorganisasian dalam otak akan melahirkan reaksi tingkah laku atau aktivitas yang positif terhadap objek yang diterimanya. Akan tetapi sebaliknya, bila persepsi terhadap suatu objek itu tidak baik, maka hasil pengorganisasian dalam otak pun akan melahirkan reaksi tingkah laku atau aktivitas yang negatif terhadap objek yang diterimanya.



B. Tinjauan tentang Kesejahteraan

1. Pengertian Kesejahteraan

Kesejahteraan merupakan lawan dari kemiskinan. Menurut Mubyarti,¹⁰ kesejahteraan diartikan sebagai perasaan hidup yang senang dan tenteram tidak kurang suatu apa pun dalam batas-batas yang mungkin dicapai orang seorang.

Kesejahteraan yang dikehendaki adalah kesejahteraan yang komprehensif, yaitu tidak hanya perasaan kesejahteraan materiil saja akan tetapi juga mencakup unsur kejiwaan seperti rasa tenteram lahir dan batin termasuk di dalamnya perasaan memperoleh keadilan dalam

¹⁰ Mubyarto, *Islam dan Kemiskinan*, Cet. I (Bandung: Pustaka, 1988), hal. 1.

kehidupan sehingga tidak ada yang patut menimbulkan rasa iri hati. Sudah jelas, dalam hal terpenuhinya rasa keadilan ini orang harus benar-benar terlepas dari kemiskinan yang menyiksa dan terlepas dari bahaya kemiskinan yang mengancam.

Menurut Mubyarto dan kawan-kawan,¹¹ unsur kehidupan yang bebas, bahagia dan aman, mencakup komponen-komponen sebagai berikut:

1. Mutu kehidupan fisik
2. Mata pencaharian
3. Individualitas dan kebebasan memilih
4. Pengembangan diri
5. Perkembangan sosial-politik



Mutu kehidupan fisik ditandai oleh adanya peningkatan mutu kehidupan fisik yang meliputi mutu lingkungan fisik, pola konsumsi dan pemenuhan kebutuhan fisik manusia, dan rasa aman dari gangguan-gangguan luar lain yang bersifat fisik.

Mata pencaharian ditandai dengan semakin mudahnya penduduk, dalam mendapatkan nafkah bagi dirinya dan keluarganya. Adapun individualitas dan kebebasan memilih ditandai dengan adanya kenaikan dari bagian penduduk yang mampu menentukan sendiri hari deannya, dan hari depan anak-anaknya dengan sekaligus ada kecenderungan

¹¹ Mubyarto, dkk., *Nelayan dan Kemiskinan*, Cet. I (Jakarta: Rajawali, 1984), hal. 8.

makin berkurangnya konflik kepentingan antarindividu. Dalam hal ini termasuk semakin besarnya peranan wanita dan anak-anak dalam peningkatan mutu kehidupan sehari-hari.

Pengembangan diri ditandai dengan adanya peningkatan dalam jumlah orang yang makin menyadari peranan lingkungannya, makin mengetahui bagaimana menambah keterampilannya, hak-haknya, dan kesempatan-kesempatannya, dan dalam kesadarannya atas kewajiban-kewajiban sosial dan tanggung jawabnya.

Kemudian perkembangan sosial dan politik ditandai dengan adanya pertambahan dalam jumlah orang yang semakin mampu ikut serta secara aktif dalam pengambilan keputusan yang menyangkut nasib mereka.

Berhubung dengan adanya berbagai unsur di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pembangunan manusia tidaklah hanya menyangkut satu atau lebih faktor-faktor tertentu, akan tetapi merupakan akibat dari bekerjanya semua faktor sekaligus, yaitu kebijaksanaan dan program pemerintah, struktur ekonomi dan sosial, keadaan sumberdaya regional, perkembangan politik dan sejarah. Dalam hubungan ini pemerintah dengan kebijaksanaan dan program-programnya memegang kunci dan peranan sangat menentukan, suatu peranan yang membutuhkan tingkat campur tangan yang tepat atau optimum, tidak kurang dan tidak lebih.

Dengan demikian, yang dimaksud dengan kesejahteraan di sini adalah suatu keadaan perasaan hidup yang senang dan tenteram berkecukupan dalam batas-batas yang mungkin dicapai seseorang secara individu. Dalam arti lain, orang yang hidup sejahtera tentunya adalah orang yang tercukupi sandang pangannya, pakaian dan rumah ada sekadarnya, yang bisa membuat orang kerasan tinggal di rumah, kesehatan terpelihara, dan anak-anak dapat bersekolah atau memperoleh pendidikan yang diiharapkannya. Tentu saja bagi orang yang sudah dewasa, perasaan sejahtera adalah perasaan bahwa ia tidak akan hidup terlantar di hari tua. Oleh karena itu kesejahteraan juga mencakup unsur kejiwaan, yaitu rasa tenteram lahir dan batin, termasuk di dalamnya perasaan memperoleh keadilan dalam kehidupan, sehingga tidak ada yang patut menimbulkan rasa iri hati.

2. Indikator-indikator Kesejahteraan

Berdasarkan pengertian kesejahteraan sebagaimana tersebut di atas, maka dalam kesejahteraan terdapat beberapa indikator dasar yang menandai seseorang hidup sejahtera. Sebagaimana telah dikatakan oleh Muyarto terdahulu, bahwa indikator kesejahteraan itu minimal ada lima macam, yaitu: mutu kehidupan fisik, mata pencaharian, individualitas dan

kebebasan memilih, pengembangan diri, dan perkembangan sosial politik.

Indikator pertama kesejahteraan adalah mutu kehidupan fisik. Mutu kehidupan fisik ditandai oleh adanya peningkatan mutu kehidupan fisik yang meliputi mutu lingkungan fisik, pola konsumsi dan pemenuhan kebutuhan fisik manusia, dan rasa aman dari gangguan-gangguan luar lain yang bersifat fisik.

Indikator kedua adalah mata pencaharian. Mata pencaharian ditandai dengan semakin mudahnya penduduk dalam mendapatkan nafkah bagi dirinya dan keluarganya.

Indikator ketiga adalah individualitas dan kebebasan memilih. Hal itu ditandai dengan adanya kenaikan dari bagian penduduk yang mampu menentukan sendiri hari depannya, dan hari depan anak-anaknya, dengan sekaligus ada kecenderungan makin berkurangnya konflik kepentingan antarindividu. Dalam hal ini termasuk semakin besarnya peranan wanita dan anak-anak dalam peningkatan mutu kehidupan sehari-hari.

Indikator keempat kesejahteraan adalah pengembangan diri. Pengembangan diri ditandai dengan adanya peningkatan dalam jumlah orang yang makin menyadari peranan lingkungannya, makin mengetahui

bagaimana menambah keterampilannya, hak-haknya dan kesempatan-kesempatannya, dan dalam kesadarannya atas kewajiban-kewajiban sosial dan tanggung jawabnya.

Indikator terakhir kesejahteraan yaitu perkembangan sosial politik. Perkembangan sosial politik ditandai dengan adanya penambahan dalam jumlah orang yang semakin mampu ikut serta secara aktif dalam pengambilan keputusan yang menyangkut nasib mereka.

3. Kesejahteraan dalam Tinjauan Islam

Sebelum membicarakan masalah kesejahteraan dalam tinjauan ajaran Islam, terlebih dahulu perlu dipertegas mengenai karakteristik syariat Islam itu sendiri. Dalam kaitan ini pemikiran tentang syariat Islam senantiasa berkait erat dengan masalah manusia.

Dalam pandangan syariat Islam, manusia adalah *khalifah* Allah yang diberi *taklif* (tanggung jawab) oleh Allah untuk mengelola potensi-potensi alam untuk kehidupannya. Syariat Islam telah mengajarkan, mengarahkan dan membimbing manusia untuk menjadi makhluk *mukallaf*. Untuk itu manusia diberikan segala fasilitas hidup terhormat yang dibutuhkannya dalam rangka mengemban amanah yang dipercayakan kepadanya. Bumi dan angkasa rasa mendukungnya penuh

dengan benda dan energi yang merupakan bahan-bahan siap olah. Kepadaanya juga diberikan prasarana dan sarana yang memungkinkan manusia melakukan pengolahan atas bahan-bahan tersebut. Prasarana yang terpenting di antaranya adalah nafsu yang merupakan sumber daya penggerak bagi kehidupan manusia. Di samping nafsu, manusia juga diberikan potensi akal yang merupakan sumber pengendali, dan agama yang merupakan daya pembimbing dan petunjuk jalan dalam mengarungi lautan kehidupan itu.

Jadi, dalam pandangan syariat Islam, manusia telah diberikan *taklif* yang jelas, yang di dalamnya meliputi seluruh gerak perbuatan manusia apabila sumber daya pengendali kehidupannya (akal) sudah berfungsi penuh. Dengan adanya hak-hak dan kewajiban-kewajiban serta tanggung jawab yang melekat pada taklif itu, maka timbullah syariat atau hukum. Syariat ini bertujuan untuk menata dan mengatur segala hak dan kewajiban serta tanggung jawab manusia itu sendiri demi kemaslahatan hidupnya.

Dengan demikian syariat Islam sangat berkaitan erat dengan upaya untuk menciptakan kemaslahatan hidup manusia. Demikianlah dalam bidang kegiatan ekonomi, jaminan kesejahteraan yang mengandung

jaminan perilaku adil dan jaminan untuk lepas dari ancaman kemiskinan dan pengangguran adalah sangat diperhatikan oleh Islam.

Agama Islam menempatkan masalah keadilan pada urutan tertinggi. Sebab menurut Priyono Tjiptoherijanto,¹² prinsip mendasar dari ekonomi Islam menekankan kehendak untuk mengurangi konsumsi pribadi, mengurangi simpanan dan tabungan pribadi serta menambah pengeluaran di jalan Allah. Sendi ekonomi dalam Islam ditekankan pada prinsip tauhid dan eprsaudaraan.

Berdasarkan kenyataan itu, tujuan terpenting dari ajaran Islam dalam kaitannya dengan hukum ekonomi adalah mengarah kepada kesejahteraan manusia secara luas. Dalam Islam konsep kesejahteraan ini telah dipelopori oleh Nabi Muhammad SAW dalam mengembangkan misi beliau untuk mengharap anugerah Allah bagi seluruh manusia, dengan mengerjakan hal-hal yang diridhai-Nya.

Konsep kesejahteraan dalam syariat Islam selalu dihubungkan dengan penanggulangan kesulitan, menumbuhkan kemakmuran, membentuk iklim yang penuh dengan cinta kasih dan perhatian, menjamin tidak akan terdapat korupsi, kelaparan, ketakutan dan gangguan mental. Jadi, merupakan tugas pemimpin atau kelompok

¹² Priyono Tjiptoherijanto, *"Moral Pembangunan dalam Sistem Ekonomi Islam"*, dalam Mubyarto, dkk., *Islam dan Kemiskinan*, Cet. I (Bandung: Pustaka, 1988), hal. 12.

yang memerintah ummat untuk menumbuhkan keadaan-keadaan tersebut bila kesejahteraan yang merupakan tujuan akhir sistem ekonomi Islam.

Bagi Islam, kesejahteraan yang hakiki mencakup dua hal, yaitu sebagai berikut:

1. Realisasi sepenuhnya atas nilai-nilai Islam di dalam setiap individu muslim maupun di dalam masyarakat secara keseluruhan.
2. Kecukupan seluruh kebutuhan dasar bagi kehidupan seluruh anggota masyarakat.¹³

Untuk mencapai tujuan di atas, Islam telah mempunyai sistem ekonomi yang diharapkan dapat membawa manusia kepada kesejahteraan, yaitu sistem ekonomi zakat. Ia memegang peranan penting dalam hubungannya dengan pembagian pendapatan dalam masyarakat yang mengarah pada keadilan sosial, yang memang ditumbuhkan dalam masyarakat Islam. Sebagai salah satu alat untuk pemerataan pendapatan, yang diberikan zakat adalah sebagian dari rizki dan merupakan harta yang dicintainya. Dengan mengeluarkan zakat dan sedekah, maka Allah menjamin wajib zakat tersebut tidak akan menjadi miskin. Karena pada dasarnya hanya Allah lah pemberi rizki yang sesungguhnya.

¹³ Mubyarto, *Op. Cit.*, hal. 15.

Harta benda yang dianugerahkan Tuhan kepada manusia adalah cobaan kepada mereka (Q.S. Al-An'âm:165). Apakah mereka melaksanakan fungsi sosial dari harta tersebut atau tidaknya tergantung kepada kemauannya (Q.S. Al-Hadîd:7). Dengan demikian Islam tidak membenarkan adanya harta benda yang tidak dimanfaatkan.

Mengingat harta benda berfungsi sosial, maka harta tersebut tidak dibenarkan untuk dimiliki orang-orang yang dapat menyia-nyiakannya (Q.S. An-Nisâ:5). Dari sini diketahui bahwa walaupun masing-masing pribadi, baik pria maupun wanita mempunyai hak terhadap hasil usahanya, namun hal tersebut tidak boleh mengakibatkan kerugian kepada pihak lain.

Islam juga menggarisbawahi bahwa kebutuhan-kebutuhan pokok manusia tidak boleh dimonopoli oleh seseorang atau satu kelompok. Oleh karena itu setiap orang diharuskan bekerja. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ
كَثِيرًا الْعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. (الجمعة: ١٠)

"Apabila telah ditunaikan sembahyang, maka bertebaranlah kamu di muka bumi, dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung".¹⁴

¹⁴ Q.S. Al-Jum'ah (62):10.

Namun, harus digarisbawahi bahwa hal tersebut terikat dengan nilai-nilai moral agama dan pengabdian dalam hidup bermasyarakat. Karenanya, setiap individu dan setiap masyarakat harus berusaha untuk menanggulangi problem-problem, baik yang bersifat kolektif maupun perorangan. Dari sinilah maka diwajibkan zakat, sedekah, dan infaq.

Jadi dengan demikian kesejahteraan dalam pandangan Islam adalah kehidupan ideal yang mencakup pemenuhan kebutuhan fisik material manusia dan kebutuhan psikisnya secara ekonomis, dengan tetap mengarah pada pencapaian keadilan. Apabila kebutuhan-kebutuhan tersebut tidak terpenuhi, maka orang tersebut termasuk kategori miskin. Hal itu bisa dipenuhi dengan cara memberikan pemerataan pendapatan antara individu yang satu dengan lainnya. Pemerataan itu bisa diwujudkan apabila zakat sebagai salah satu sistem ekonomi Islam yang dapat mensejahterakan.

BAB III

GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN

A. Geografi dan Kependuduk

Kecamatan Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya, terletak pada dataran yang subur, yang luasnya 8.882,893 hektar, dan berpenduduk sebanyak 122.030 orang. Mata pencaharian utama adalah bertani dengan mengusahakan tanaman padi dan palawija sebagai tanaman pokok.¹

Mengingat hampir seluruh penduduknya beragama Islam dengan ditunjang oleh banyaknya pondok pesantren, maka kecamatan ini mempunyai banyak alim ulama yang cukup berpengaruh sebagai pimpinan masyarakat dan telah dapat menggalang kesatuan rakyat setempat untuk pembangunan. Seusai Perang Dunia II para alim ulama yang sudah sejak lama merupakan tokoh masyarakat, aktif menjalankan peranan sebagai pembina dan penggerak masyarakat dengan cara mengkoordinasi dan mengatur pengajian-pengajian di tiap-tiap majelis ta'lim, yang melibatkan segenap unsur masyarakat setempat baik orang tua, pemuda, anak-anak, pria maupun wanita. Kegiatan seperti ini tidak saja dilakukan di bidang keagamaan, tetapi juga di bidang-bidang

¹ *Tasikmalaya dalam Angka 2001*. Tasikmalaya: BPS dan BAPPEDA Kabupaten Tasikmalaya.

kehidupan lainnya, sehingga dengan demikian kelihatan para warga kecamatan benar-benar berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat. Kebiasaan ini tetap berlangsung sampai kurun pembangunan dewasa ini dan inilah pula yang telah mendorong rasa kesatuan para warga masyarakat dalam setiap kegiatan bagi kepentingan bersama yang pada gilirannya mengokohkan sikap kerjasama yang kompak antara pimpinan kecamatan (Muspika: Camat, Kapolsek, Danramil, KUA), para alim ulama dan masyarakat. Keberhasilan para pemuka Kecamatan Singaparna membangkitkan swadaya masyarakat dalam menghadapi masalah-masalah pembangunan merupakan contoh konkret dari suatu model pembangunan yang bertitik tolak usahanya dari masalah rakyat kecil di tingkat paling bawah, yaitu masyarakat tani di pedesaan, misalnya dalam hal pembangunan sarana keagamaan di wilayah Kecamatan Singaparna, yang biayanya swadaya murni masyarakat setempat, dengan memanfaatkan potensi ulama untuk menggerakkannya.

Adalah menarik sekali untuk diungkapkan semangat gotong-royong masyarakat Kecamatan Singaparna, terutama karena motivasi yang digunakan adalah nilai-nilai budaya, yaitu dengan cara mengajak masyarakat mengenal masalah sekitar mereka yang sedang dihadapi serta membantu mereka mengorganisasi dirinya sendiri guna mencari

pemecahan yang sesuai dengan kemampuan dan situasi setempat. Hal ini mendorong rasa tanggung jawab para warga masyarakat terhadap kesejahteraan daerahnya. Tampaknya pimpinan masyarakat di kecamatan ini secara cermat, berdasarkan etika, moral dan ajaran agama, mampu memberi interpretasi, membimbing, menunjukkan teladan secara konkret terhadap berbagai persoalan nyata dan aktual yang dihadapi masyarakat.

Kecamatan Singaparna berada pada ketinggian $\pm$ 356 meter dari permukaan laut, dan berjarak 15 kilometer sebelah Timur Kota Tasikmalaya. Kecamatan ini dikelilingi oleh beberapa wilayah kecamatan, yaitu kecamatan Leuwisari di sebelah Timur, Kecamatan Mangkubumi di sebelah Barat, Kecamatan Indihang di sebelah Utara, dan Kecamatan Kawalu di sebelah Selatan. Kecamatan yang terdiri dari 22 desa ini dapat dicapai melalui jalur kencanaan umum jurusan Tasikmalaya-Singaparna, Tasikmalaya-Bandung lewat Singaparna-Garut, dan angkutan kota Tasikmalaya-Singaparna.

Keadaan Topografi kecamatan ini cukup baik, karena sebagian besar wilayahnya merupakan daratan, dan tanahnya terdiri dari jenis lotosal yang baik untuk persawahan, tegalan dan pertanian pada umumnya dengan produktivitas sedang sampai tinggi. Tingkat curah

hujan rata-rata per tahun di sini antara 2000-3000 mili meter. Di samping itu, wilayah kecamatan ini dilewati sungai yang telah dimanfaatkan secara baik untuk pengairan (teknis), terutama untuk pertanian dan perikanan.

Luas wilayah Kecamatan Singaparna adalah 8.882,893 hektar dengan rincian penggunaan tanah sebagai berikut:

Tabel 1
Penggunaan Tanah di Wilayah Kecamatan Singaparna

Tahun 2001		
No	Penggunaan Tanah	Luas (Hektar)
1	Perumahan	1.245,306
2	Persawahan	2.207,354
3	Ladang/Tegalan	3.248,471
4	Hutan	1.300,585
5	Danau/Kolam	36,828
6	Alang-alang/Padang rumput	130,137
7	Lain-lain	714,215
Σ	Jumlah	8.882,893

Sumber: Monografi Kantor Kecamatan Singaparna, Juni 2001

Kemudian, berdasarkan data kependudukan per Juni 2001, penduduk Kecamatan Singaparna seluruhnya berjumlah 122.030 orang terdiri atas laki-laki sebanyak 59.970 orang dan perempuan 62.060 orang. Dibanding dengan luas kecamatan (8.882,893 ha), kecamatan ini dapat diklasifikasikan sebagai wilayah yang berpenduduk jarang, yaitu: $122.030 \text{ orang} : 8.882,893 \text{ ha} = 13,74 \text{ orang/ha}$, dan rata-rata pertambahan penduduk tiap tahunnya sebesar 0,08%.

Rincian penduduk berdasarkan kelompok umur tercermin dalam tabel 2 berikut:

Tabel 2
Keadaan Penduduk Kecamatan Singaparna
Tahun 2001

Umur	Jumlah	Persentase (%)
0 - 6	23.309	21,56
7 - 15	20.809	17,05
16 - 18	7.167	5,87
19 - 24	7.106	5,82
25 - 55	46.357	37,99
56 - 79	14.185	11,62
80 tahun ke atas	97	0,08
Jumlah	122.030	100,00

Sumber: Monografi Kantor Kecamatan Singaparna, Juni 2001

Adapun pembagian jumlah penduduk Kecamatan Singaparna berdasarkan wilayah pedesaan adalah sebagai berikut:

Tabel 3
Jumlah Penduduk Kecamatan Singaparna
Berdasarkan Wilayah Pedesaan
Tahun 2001

No	Desa	Jumlah KK	Jumlah Penduduk	
			Laki-laki	Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Singaparna	1933	3603	3686
2	Singasari	1588	3005	3147
3	Cikunten	1166	2145	2096
4	Sukaherang	995	1841	2007
5	Sukamulya	1037	1707	1819
6	Sukaasih	1103	1752	1930
7	Cipakat	1457	3874	3855
8	Cintaraja	2000	4122	4122
9	Cikunir	1862	3500	3258

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
10	Cikadongdong	935	2199	2258
11	Sukarame	1959	3412	3748
12	Sukamenak	1776	3852	3715
13	Wargakerta	1049	2610	2761
14	Sukarapih	1165	2231	2415
15	Sukakarsa	1258	2550	2594
16	Padasuka	1086	2019	1915
17	Mangunreja	2026	3677	3967
18	Margajaya	1367	2711	2831
19	Sukasukur	1396	2625	2699
20	Saebu	1231	2191	2233
21	Sukaluyu	1212	2008	2071
22	Pasirsalam	1608	2641	2570

Sumber: Monografi Kantor Kecamatan Singaparna, Juni 2001

B. Kondisi Sosial Ekonomi dan Pendidikan

Kecamatan Singaparna yang merupakan tempat pemukiman dan tanah pertanian sebagaimana dikenal sekarang, dahulu merupakan daerah atau areal hutan pegunungan, yakni Gunung Galunggung.

Jalan-jalan kecamatan walaupun belum seluruh desa diberi aspal, tetapi cukup terpelihara, sudah dapat dilintasi kendaraan umum, begitu pula kondisi pengairannya sangat baik dan terawat, karena disadari bahwa pengairan memegang peranan penting bagi pertanian dan perikanan masyarakat setempat.

Bahkan jalan protokol Singaparna merupakan daerah lintasan kendaraan bus antarkota dan antarpropinsi, terutama jurusan Banjar-Jakarta lewat Garut, atau sebaliknya.

Kebanyakan penduduknya adalah orang-orang Priangan yang pada umumnya sudah sejak lama dan turun-temurun menetap dan bermukim menjadi kelompok besar. Karena itu dialek Sunda Priangan digunakan dalam percakapan sehari-hari.

Agama Islam yang dianut oleh hampir seluruh penduduk sangat mendalam pengaruhnya terhadap perikehidupan masyarakatnya, sehingga corak tradisi budaya yang dilatarbelakangi ajaran agama ini paling menonjol dirasakan dalam kegiatan kemasyarakatan mereka.

Berkenaan dengan itu dalam usaha pembangunan kecamatan ternyata para alim ulama setempat mempunyai peranan penting sebagai pemimpin informal, dan dengan kerja sama yang serasi dengan Muspioka kecamatan telah berhasil mendinamisasi masyarakatnya. Dengan menanamkan pengertian dan melaksanakan ajaran-ajaran agama Islam melalui pengajian-pengajian yang diadakan secara rutin telah membuat pergaulan masyarakatnya dalam suasana tenang dan tenteram, sehingga dapat mencurahkan cukup perhatian kepada usaha pertanian dan perikanan sebagai mata pencaharian utama sebagian besar penduduknya. Penduduk yang ebragama Kristen ada tujuh orang dan Katolik sebanyak empat orang. Tidak ada warga negara asing di daerah tersebut.

Sebagaimana lazimnya di tiap-tiap kecamatan, Kecamatan Singaparna juga mempunyai sebuah balai pertemuan kecamatan tempat rapat-rapat kecamatan diadakan, dan juga sekaligus sebagai kantor Camat. Letaknya yang strategis dikelilingi permukiman dan pusat lalu lintas umum serta pasar, menjadikan sekitar tempat tersebut sebagai pusat berbagai kegiatan sosial ekonomi masyarakat kecamatan ini, dan juga untuk keperluan pelayanan umum bagi petugas-petugas resmi yang sewaktu-waktu bertugas di kecamatan tersebut. Pengurusan administrasi kecamatan walaupun belum memadai hasilnya, mengingat keterbatasan tenaga pelaksana/SDM, secara bertahap dengan adanya sistem registrasi yang standar ditentukan oleh Pemerintah sangat membantu memudahkan pelaksana, baik dalam pembuatan data, catatan keuangan dan laporan.

Di Kecamatan Singaparna terdapat 126 buah masjid, 238 buah langgar/mushalla, dan beberapa fasilitas pendidikan seperti: 11 buah TKA/TPA, 72 buah SD, 27 buah SLTP, 12 buah SLTA, 60 buah pesantren, dan tiga buah Perguruan Tinggi yaitu Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Cipasung, Sekolah Tinggi Teknologi Cipasung (STTC), dan Institut Agama Islam Cipasung (IAIC).

Adapun tingkat pendidikan penduduk Kecamatan Singaparna secara umum adalah sebagaimana terlihat pada tabel 4 berikut:

Tabel 4
Keadaan Tingkat Pendidikan Penduduk Kecamatan Singaparna
Tahun 2001

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah (orang)
1	Buta huruf	-
2	Tidak tamat SD	9.271
3	Tamat SD/ sederajat	28.045
4	Tamat SLTP	34.065
5	Tamat SLTA Umum	5.532
6	Tamat SLTA Kejuruan	5.774
7	Tamat Pondok Pesantren	5.018
8	Sarjana Muda	1.021
9	Sarjana	1.173
10	Belum Sekolah	32.131
Σ	Jumlah	122.030

Sumber: Monografi Kantor Kecamatan Singaparna, Juni 2001

Kelihatannya penduduk Kecamatan Singaparna belum banyak berorientasi untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan lebih tinggi setelah tamat dari Sekolah Dasar. Umumnya orang tua lebih senang anaknya bekerja setelah lulus SD daripada melanjutkan ke jenjang pendidikan lebih tinggi. Kecilnya animo masyarakat memasuki sekolah membawa pengaruh lebih jauh terhadap kurangnya kecerdasan anak, masalah gizi, serta keterbelakangan. Di antara sebab-sebab minimnya masyarakat menyekolahkan anaknya ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi adalah karena keterbatasan kemampuan pembiayaan, dipergunakannya tenaga

kanak-kanak sebagai modal pertanian/perikanan, di samping kurangnya kesadaran tentang pentingnya pendidikan yang lebih tinggi.

Berdagang merupakan mata pencaharian utama penduduk di Kecamatan Singaparna. Keadaan ini dirasakan tidak saja sebagai kejadian alamiah, tetapi juga merupakan proses sosial dan ekonomi yang tidak jarang bersangkut-paut dengan masalah adat dan kepercayaan.

Data setempat memperlihatkan struktur pekerjaan penduduk sebagai berikut:

Tabel 5
Struktur Pekerjaan Penduduk Kecamatan Singaparna
Tahun 2001

No	Pekerjaan	Jumlah	Persentase (%)
1	Petani	8.809	28,21
2	Peternak	3.381	10,83
3	Pedagang	11.071	35,45
4	Menyewakan Rumah	121	0,39
5	PNS	4.131	13,23
6	TNI/Polri	79	0,25
7	Buruh Pabrik/Industri	871	2,79
8	Buruh Tani	1.776	5,69
9	Buruh Bangunan	658	2,11
10	Pengrajin	122	0,39
11	Pengusaha/Pemilik Industri	102	0,33
12	Penjahit	108	0,35
Σ	Jumlah	31.229	100,00

Sumber: Monografi Kantor Kecamatan Singaparna, Juni 2001

Data Tabel 5 di atas menunjukkan bahwa kebanyakan penduduk Kecamatan Singaparna bermatapencaharian sebagai pedagang

(34,45%). Adapun mereka yang bekerja di sektor pertanian atau sebagai petani sebanyak 28,21% dan sebagai buruh tani sebanyak 5,69%.

Penduduk usia angkatan kerja sebanyak 79.829 orang, sedangkan yang bekerja hanya 31.229 orang. Dengan demikian penduduk angkatan kerja yang dapat terserap adalah 48.600 orang atau sekitar 39,12%. Jumlah penduduk yang miskin tercatat sebanyak 15.940 orang atau 13,06% dari seluruh jumlah penduduk Kecamatan Singaparna (122.030 orang), dan terdiri atas 4.056 kepala keluarga atau 5,74% dari 31.413 kepala keluarga.

Kecamatan Singaparna dibatasi di sebelah timurnya oleh jalan propinsi yang menampung arus lalu-lintas angkutan umum cukup padat, menghubungkan Jakarta-Banjar lewat Garut, Bandung-Tasikmalaya lewat Singaparna, dan Garut-Tasik. Di samping itu terdapat terminal regional Singaparna yang menghubungkan kota kecamatan tersebut dengan wilayah kecamatan lainnya.

Mungkin karena hubungan yang jauh dengan ibukota kabupaten dan pertimbangan kebutuhan harian penduduk, maka Kecamatan Singaparna memiliki pasar yang memadai, kendatipun statusnya adalah pasar kecamatan. Namun di sekitar pasar tersebut didukung pula oleh

perkantoran dan perbankan. Hal ini menyebabkan mobilisasi massa dan arus uang yang beredar cukup besar yang diperkirakan hampir 1 milyar dalam setiap harinya.

Komoditas ekonomi yang berkembang dan menjadi ciri khas Kecamatan Singaparna adalah perikanan, padi, palawija, kacang-kacangan, sayuran, buah-buahan, dan kelapa. Berdasarkan kegiatan ekonomi dan pembangunannya, Kecamatan Singaparna telah diklasifikasikan sebagai kecamatan swakarya, yaitu suatu kecamatan dengan tingkat *output* antara Rp 100 juta sampai dengan Rp 200 juta pertahun. Kategori ini menunjukkan bahwa rata-rata income perkapita penduduk berkisar antara Rp 30.000,- sampai Rp 60.000,- per tahun dengan perhitungan mata uang dolar Amerika Serikat sekitar 8.500 (Juni 2001).

C. Kesehatan dan Keluarga Berencana

Dalam bidang kesehatan, pengelolaannya dilakukan oleh Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Kecamatan Singaparna. Namun, di daerah tersebut juga terdapat lima orang dokter, 24 orang bidan, delapan orang mantri kesehatan, dan lima orang dukun beranak.

Penyakit yang cukup banyak diderita oleh penduduk Kecamatan Singaparna umumnya adalah lumpuh, malaria, yang pananggulangnya

ditangani oleh Puskesmas setempat dan Rumah Sakit Umum Tasikmalaya serta rumah sakit-rumah sakit swasta lainnya. Keadaan kesehatan pada umumnya cukup baik, sedangkan hambatan utamanya adalah pengadaan air bersih (air PAM) yang belum merata.

Dalam bidang Keluarga Berencana, tercatat jumlah peserta 43.300 orang. Dari jumlah tersebut 7000 orang menggunakan IUD, kondom 3400 orang dan pil sebanyak 30.900 orang. Sedikitnya masyarakat menggunakan kontrasepsi IUD dan kondom disebabkan karena alasan agama/syariat Islam semata dan adanya akibat samping dari penggunaan kedua macam alat kontrasepsi tersebut. Meskipun demikian, program Keluarga Berencana dapat dikatakan berhasil berdasar rata-rata jumlah anak di Kecamatan Singaparna di bawah lima orang anak tiap keluarga.

D. Agama dan Kebudayaan

Adapun tentang kegiatan kebudayaan, perlu dijelaskan mengenai pengertian kebudayaan dalam tulisan ini dibatasi pada pengertian kesenian dan olahraga yang sebagian besar dilakukan pemuda pemudi untuk mengisi waktu luangnya. Bentuk kesenian yang berkembang adalah kesenian yang mendapat pengaruh dari penghayatan mereka

terhadap ajaran Islam yang dipeluknya. Sedangkan kesenian yang dipengaruhi atau bersumber dari kebudayaan suku bangsanya (dalam hal ini suku Sunda yang merupakan 99% penduduk Kecamatan Singaparna) tidak terlihat kehadiran dan perkembangannya. Bentuk-bentuk kesenian yang dipengaruhi oleh penghayatan mereka terhadap ajaran Islam yang dipeluknya diantaranya adalah sebagai berikut:

1. *Deba'an/Barjanji*, yang dilakukan oleh sebagian besar masyarakat Kecamatan Singaparna yang tersebar di 22 desa, yang dilaksanakan pada setiap malam Jum'at, baik di lingkungan pesantren-pesantren ataupun majelis ta'lim dan masjid atau mushalla.
2. *Manakiban* atau pembacaan *Manakib Syekh Abdul Qadir Zaelani* yang dilakukan oleh kelompok masyarakat tertentu (Penganut Thariqat Naqsabdhiah) setiap bulan sekali, terutama dilakukan oleh kalangan penganut thariqat tersebut di Desa Cipakat.

Selain kegiatan keagamaan, kegiatan lainnya yang berkembang adalah olahraga yang meliputi: sepakbola sebanyak tiga klub, volley ball delapan klub, bulutangkis 12 klub, dan tenis meja satu klub.

Kegiatan sosial lainnya yang dikoordinasi oleh Pemerintah Kecamatan Singaparna dan kepala-kepala desa di antaranya adalah: PKK,

Pramuka, UKS (Usaha Kesehatan Sekolah), Hansip, dan pengajian mingguan.

Kemudian dalam kehidupan keagamaan, berdasarkan catatan yang ada di Kantor Kecamatan Singaparna, bahwa agama Islam menjadi agama yang dipeluk oleh hampir seluruh warga masyarakat. Selain Islam hanya ada penganut Protestan sebanyak tujuh orang, dan Katolik empat orang.

Keberadaan agama Islam di Kecamatan Singaparna tidak diketahui secara pasti asal mulanya. Namun berdasarkan keterangan para ulama setempat, perkembangan Islam di Kecamatan Singaparna tidak lepas dari perjuangan pahlawan nasional K.H. Zenal Mustofa (almarhum almaghfurlah) yang berkedudukan di Pesantren Sukamanah. Bersama ulama lainnya seperti K.H. Ruhiyat (almarhum almaghfurlah) di Cipasung yang mendirikan Pesantren Cipasung.

Organisasi keagamaan utama yang diikuti oleh hampir seluruh penduduk Kecamatan Singaparna adalah *Jam'iyah Nahdlatul 'Ulama* (NU), dan menyalurkan aspirasi politiknya lewat partai-partai politik yang bernaifaskan Islam, seperti Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Dalam memperjuangkan tegaknya syari'at Islam, pada masa lalu para pemuda kecamatan bergabung dalam laskar *Hizbullah* yang ikut berjuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia bersama-sama dengan tentara dan laskar perjuangan lainnya. Dalam suasana peperangan itu pula diusahakan berdirinya lembaga pendidikan Islam seperti Pesantren Cipasung, Pesantren Sukamanah, Pesantren Sukahideng, dan lainnya.

Setelah periode tersebut Islam menghampakkan kehadiran dan pengaruhnya sehingga dewasa ini agama selain Islam tidak berkembang di wilayah kecamatan tersebut. Dalam seluruh bidang sosial dan budaya yang terdapat di kecamatan tersebut, pengaruh ajaran Islam sangat menonjol. Begitu pula organisasi NU, baik ketika menjadi organisasi sosial masyarakat maupun organisasi sosial politik, tetap merupakan organisasi yang terkuat serta berpengaruh di Kecamatan Singaparna.

Masuknya organisasi selain NU ke wilayah Kecamatan Singaparna baru terjadi sekitar tahun 1970-an, yaitu Persatuan Islam, Muhammadiyah, Persatuan Ummat Islam, dan Ahmadiyah. Namun ormas-ormas keagamaan tersebut pada perkembangan selanjutnya tidak mengalami perkembangan yang berarti. Hal itu karena kuatnya dominasi

Jam'iyah Nahdlatul Ulama yang digerakkan oleh para ulama pimpinan pondok pesantren yang cukup banyak di kecamatan tersebut.

Penduduk Kecamatan Singaparna yang hampir seluruhnya (99,99%) beragama Islam mengaku penganut *Ahlus Sunnah wal Jama'ah*, yang dalam masalah hukum Islam mengikuti mazhab Syafi'i. Di kalangan kaum awamnya, pengakuan sebagai penganut *Ahlus Sunnah wal Jama'ah* dan pengikut mazhab Syafi'i tidak dipahami secara mendalam, akan tetapi pada kalangan ulamanya kelihatan ada usaha untuk secara konsekuen memahami dengan kesadaran tinggi dan maksimal. Ada kecenderungan bagi ulama-ulama di Kecamatan Singaparna menggunakan rujukan ulama-ulama salafiyah yang tertulis dalam kitab-kitab klasik untuk memberikan fatwa-fatwa keagamaan kepada masyarakatnya.

Secara kultural, pemeluk Islam yang ada di Kecamatan Singaparna dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu *kaum awam* dan *ulama*. Kaum awam adalah mereka yang memahami ajaran Islam secara kurang mendalam dan tidak memilih profesinya sebagai ahli agama. Akan tetapi dalam penghayatan dan pengamalan ajaran agama ada yang berusaha secara mendalam, di samping ada juga yang menghayati ajaran agamanya agak kurang mendalam. Dalam kelompok kaum awam yang

merupakan kelompok terbesar, golongan yang berusaha menghayati dan mengamalkan ajaran Islam secara mendalam merupakan golongan terbesar yang terdapat di kecamatan tersebut. Hal ini disebabkan karena usaha pendidikan agama Islam secara merata dan terpadu yang dilakukan oleh para ulama dan pimpinan kecamatan atau desanya masing-masing.

Adapun kaum ulama adalah mereka yang secara sadar memilih profesi ahli agama sebagai salah satu pilihan hidupnya dan mendapat pengakuan dan penghargaan dari masyarakat sebagai ulama dan mendapat langgihan atau gelar *kiai* atau *ajengan*. Terhadap pengakuan, penghargaan dan gelar ini, mereka umumnya tidak menolak dan berusaha menyesuaikan diri dengannya dalam sikap, tindakan, pembicaraan, bahkan cara berpakaian sekalipun.

Di kalangan pemeluk Islam di Kecamatan Singaparna terdapat banyak ulama yang sudah masyhur, baik di level regional maupun nasional, seperti K.H. Zenal Mustofa (Pahlawan Nasional), K.H. Ilyas Ruhiyat (Musytasyar PBNU dan pernah menjabat Rois Syuriah PBNU), K.H. Wahhab Muhsin, dan ulama lainnya. Anggapan ini didasarkan pengakuan bahwa dalam bidang agama mereka lebih ahli dari kaum awam. Selain itu, bahwa mereka lahir dari kalangan ulama, baik di

kecamatan tersebut maupun di tempat lain, juga memperkuat anggapan masyarakat akan keulamaan mereka yang telah diwariskan dan dikembangkan. Satu hal penting yang perlu dicatat bahwa antara ulama yang berada di Kecamatan Singaparna telah terjalin ikatan keluarga yang kuat, baik yang didasarkan atas ikatan darah maupun ikatan perkawinan di antara keturunan mereka. Bahkan mereka kelihatan berusaha memperkuat ikatan-ikatan tersebut dalam proses berkeluarga di antara anak dan keluarga mereka.

Para ulama tersebut sebagian besar mendapatkan pendidikan dan pengetahuan agamanya di pesantren-pesantren, baik yang berada di Indonesia maupun di Timur Tengah. Cukup banyak ulama yang telah mendapatkan pendidikan umum selain dari pendidikan pesantren yang bahkan dari luar negeri, seperti K.H. Dudung Abdul Halim, MA yang lulusan Universitas Al-Azhar Mesir, kini menjabat sebagai Ketua MUI Kabupaten Tasikmalaya dan sekaligus sebagai pengasuh Pondok Pesantren Cipasung,

Dalam masyarakat kecamatan, pengaruh ulama tersebut sangat kuat sebagai pimpinan informal dan mereka melakukan peranannya bukan hanya sebagai pimpinan organisasi keagamaan, tetapi juga sebagai pimpinan masyarakat yang pengaruhnya justru melebihi

pengaruh pimpinan formal kecamatan. Kesan kuatnya pengaruh ulama dalam kepemimpinan masyarakat tersebut disadari dan diakui oleh Muspika, sehingga dalam banyak hal pihak pimpinan formal kecamatan selalu mengikutsertakan para ulama dalam menangani masalah-masalah pemerintahan dan kemasyarakatan di kecamatan tersebut. Satu contoh kecil saja yang menunjukkan kuatnya pengaruh agama dan ulama setempat adalah dalam pembangunan sarana-sarana keagamaan maupun pembangunan sarana-sarana umum lainnya.



E. Organisasi Massa

Seperti yang telah disinggung di atas, bahwa organisasi massa yang berkembang dan mayoritas ada di wilayah Kecamatan Singaparna adalah *Nahdlatul Ulama* atau NU. NU yang secara historis telah berakar di kecamatan tersebut dewasa ini cukup besar pengaruhnya, apalagi setelah salah seorang tokoh NU terpilih menjadi pimpinan nasional sebagai Presiden RI ke-4, yaitu K.H. Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Di samping itu, tokoh Singaparna atau tepatnya tokoh Cipasung menjadi Rois Syuriah PBNU dan Musytasyar NU tingkat pusat, yaitu K.H. Ilyas Ruhiyat. Dengan keberhasilan-keberhasilan dari tokoh-tokoh NU tersebut

maka gerakan-gerakan NU di Kecamatan Singaparna khususnya cukup berkembang, terutama dalam bidang pendidikan agama.

Selain di bidang pendidikan, kegiatan organisasi NU lainnya yang menonjol adalah pembinaan kemasyarakatan melalui pengajian khas NU, seperti *Lailatul Ijtima'*, *Yaumul Ijtima'*, dan *Istighasah*.

Organisasi lainnya yang masih berada di bawah naungan NU adalah *Banser* (Bantuan Serbaguna). Organisasi ini merupakan bagian dari Gerakan Pemuda Ansor yang mewadahi para pemuda NU.

Selain NU, organisasi keagamaan lainnya yang dikelola oleh ulama adalah Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang didirikan sejak tahun 1976. organisasi massa ini dipimpin oleh ulama berpengaruh di daerah itu dan melibatkan pula aparat Muspika dan KUA. Organisasi massa ini juga merupakan wadah berkiprahnya para ulama dan umara dalam memusyawarahkan permasalahan-permasalahan yang berkembang di masyarakat, baik masalah yang menyangkut bidang keagamaan ataupun permasalahan umum lainnya. Namun yang paling penting, peranan MUI ini terlihat pada pembinaan keagamaan. Dalam struktur pemerintahan kecamatan, MUI merupakan organisasi nonformal yang melakukan peranan menentukan dalam pemerintahan kecamatan. Peranan itu

dapat dilihat dengan diterimanya keputusan-keputusan atau fatwa-fatwa MUI tentang keagamaan dan kemasyarakatan.

Penduduk Kecamatan Singaparna melakukan kegiatan agamanya secara pribadi di rumah-rumah dan secara kelompok yang biasanya dilakukan di masjid-masjid, madrasah, mushalla, pesantren, balai kecamatan, balai desa, dan terbuka lainnya, baik dalam bentuk pengajian Majelis Ta'lim, pengajian rutin, *lailatul ijtima'*, *yaumul ijtima'*, ataupun istighasah.



F. Hubungan Antarwarga

Pada umumnya hubungan intern umat beragama berjalan dengan baik meskipun pada saat-saat tertentu kadang-kadang timbul konflik yang menimbulkan ketegangan, terutama apabila sudah dibumbui oleh urusan politik. Namun sejauh ini konflik secara fisik belum pernah terjadi di Kecamatan Singaparna.

Di antara faktor-faktor yang memperkuat hubungan intern umat beragama, khususnya di kalangan intern umat Islam di Kecamatan Singaparna adalah sebagai berikut:

1. Kesamaan suku bangsa, yakni sebagian besar mereka berasal atau setidaknya mempunyai hubungan darah dengan suku Sunda.

2. Kesamaan orientasi faham keagamaan, yakni sesama penganut aliran *Ahlus Sunnah wal Jama'ah*, mazhab Syafi'i dalam hukum Islam dan NU dalam organisasi sosial keagamaan.
3. Kesamaan mata pencaharian, yakni sebagai petani dan pedagang.
4. Kesamaan latar belakang pendidikan, yaitu kebanyakan masyarakat berpendidikan keagamaan di pesantren ataupun madrasah.
5. Lingkungan dan kewibawaan serta ketaatan kepada kiai serta pimpinan formal yang juga berperan memperkuat pola hubungan mereka.



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN TENTANG UPAYA PETANI DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN KELUARGA DI KECAMATAN SINGAPARNA

A. Persepsi Petani di Kecamatan Singaparna Mengenai Kemiskinan Dilihat dari Pemenuhan Kebutuhan Sandang, Pangan, Perumahan, Kesehatan dan Pendidikan

Sebagaimana telah dijelaskan dalam pembahasan teoretis bahwa kebutuhan dasar manusia secara umum terdiri dari: sandang, pangan, perumahan, kesehatan, dan pendidikan.

Untuk mengetahui lebih jelas mengenai pemenuhan kebutuhan dasar manusia di kalangan petani miskin di Kecamatan Singaparna, ikutilah pembahasan berikut ini.

1. Pemenuhan Kebutuhan Sandang (Pakaian)

Untuk mengetahui terpenuhi atau tidaknya kebutuhan sandang di kalangan petani miskin yang ada di Kecamatan Singaparna, penulis mengajukan angket nomor 1 dan 2 kepada 100 orang responden dilihat dari dua dimensi, yaitu: frekuensi petani membeli pakaian dalam setiap bulannya, dan kriteria harga pakaian yang mereka beli.

Pertanyaan pertama yang diajukan berkaitan dengan frekuensi membeli pakaian adalah: Apakah Bapak sering membeli pakaian untuk keluarganya?

Berdasarkan hasil penyebaran angket diperoleh jawaban sebagai berikut:

Tabel 6
Persepsi Responden mengenai Frekuensi Membeli Pakaian
(n = 100)

No	Alternatif Jawaban	f_i	fixi
1	a. Seminggu sekali	14	42
2	b. Sebulan sekali	23	46
3	c. Setahun sekali	63	63
Σ	Jumlah	100	151

Sumber: Hasil penelitian lapangan, 1 – 30 Juni 2001

Berdasarkan data Tabel 6 di atas, diperoleh keterangan, bahwa responden yang menjawab (a) 14 orang, yang menjawab (b) 23 orang, dan yang menjawab (c) 63 orang.

Dari data tersebut maka nilai kategorinya adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 \bar{X} &= \sum \frac{f_i x_i}{f_i} \\
 &= \frac{151}{100} \\
 &= 1,51 (\text{kategori kurang})
 \end{aligned}$$

Dengan demikian frekuensi jawaban responden tentang frekuensi membeli pakaian adalah 1,51. Nilai tersebut berada pada kategori *kurang* karena berada pada interval antara 1,00 – 1,66 sebagaimana diketahui dari diagram berikut:

Kurang	Cukup	Baik
1,00 – 1,66	1,67 – 2,33	2,34 – 3,00

Data tersebut dapat ditafsirkan bahwa para petani miskin yang ada di Kecamatan Singaparna sangat merasakan kurang terpenuhinya kebutuhan akan pakaian secara layak seperti halnya orang lain.

Bagi masyarakat petani di Kecamatan Singaparna, pakaian merupakan kebutuhan dasar yang harus terpenuhi. Namun saat ini mereka kelihatan belum memenuhi secara wajar seperti halnya orang lain. Umumnya mereka membeli pakaian untuk dirinya dan keluarganya adalah setahun sekali, yaitu pada waktu Hari Raya Idul Fitri.¹

Salah satu faktor penyebab kurangnya masyarakat petani Kecamatan Singaparna membeli pakaian adalah karena mereka tidak

¹ Wawancara dan observasi tanggal 1-30 Juni 2001

memiliki uang. Kurangnya mereka memiliki uang disebabkan pula oleh rendahnya penghasilan mereka.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa masyarakat petani di Kecamatan Singaparna belum terpenuhi kebutuhan dasar pakaianya, sehingga mereka termasuk kategori miskin.

Kemudian pertanyaan kedua berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan sandang adalah: Berapa harga pakaian yang sering Bapak beli per potongnya?

Berdasarkan hasil penyebaran angket diperoleh jawaban sebagai berikut:

Tabel 7
Persepsi Responden mengenai Harga Pakaian yang Dibeli
(n = 100)

No	Alternatif Jawaban	fi	xi	fixi
1	a. Lebih dari Rp 50.000,- per potong	9	3	27
2	b. antara Rp 25.000,- sampai Rp 49.000,- per potong	21	2	22
3	c. Kurang dari Rp 25.000,- per potong	70	1	70
Σ	Jumlah	100		119

Sumber: Hasil penelitian lapangan, 1 – 30 Juni 2001

Berdasarkan data Tabel 7 di atas, diperoleh keterangan, bahwa responden yang menjawab (a) 9 orang, yang menjawab (b) 21 orang, dan yang menjawab (c) 70 orang.

Dari data tersebut maka nilai kategorinya adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned}\overline{X} &= \sum \frac{f_i x_i}{f_i} \\ &= \frac{119}{100} \\ &= 1,19 \text{ (kategori kurang)}\end{aligned}$$

Dengan demikian frekuensi jawaban responden tentang frekuensi membeli pakaian adalah 1,19. Nilai tersebut berada pada kategori *kurang* karena berada pada interval antara 1,00 – 1,66 sebagaimana diketahui dari diagram berikut:

Kurang	Cukup	Baik
1,00 – 1,66	1,67 – 2,33	2,34 – 3,00

Data tersebut dapat ditafsirkan bahwa para petani miskin yang ada di Kecamatan Singaparna sangat merasakan kurang terpenuhinya kebutuhan akan pakaian secara layak seperti halnya orang lain. Hal ini karena sebagian besar dari mereka membeli pakaian dengan harga murah dibawah Rp 25.000,- per potongnya. Tentu saja pakaian yang

seharga tersebut termasuk kategori pakaian sangat murah sekali dan biasanya dijual di pasar tradisional atau emper toko.

Berdasarkan kedua data tersebut di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kebutuhan dasar manusia terhadap pakaian atau sandang di kalangan masyarakat petani miskin di Kecamatan Singaparna belum terpenuhi sebagaimana layaknya manusia. Oleh karena itu berarti mereka termasuk kategori miskin bila dilihat dari indikator pemenuhan kebutuhan terhadap sandang.

2. Pemenuhan Kebutuhan Pangan

Untuk mengetahui terpenuhi atau tidaknya kebutuhan pangan di kalangan petani miskin yang ada di Kecamatan Singaparna, penulis mengajukan angket nomor 3 dan 4 kepada 100 orang responden dengan kriteria: pemenuhan terhadap gizi makanan yang dikonsumsi, dan frekuensi makan dalam setiap harinya.

Pertanyaan nomor 3 yang diajukan adalah: Apakah makanan yang Bapak konsumsi penuh mengandung gizi atau tidak? Jawaban responden adalah sebagaimana terlihat pada Tabel 8 berikut:

Tabel 8
Persepsi Responden mengenai Pemenuhan Gizi Makanan yang Dikonsumsi
(n = 100)

No	Alternatif Jawaban	fi	xi	fixi
1	a. Sangat Terpenuhi	11	3	33
2	b. Kadang-kadang terpenuhi	13	2	26
3	c. Tidak pernah terpenuhi	76	1	76
Σ	Jumlah	100		135

Sumber: Hasil penelitian lapangan, 1 – 30 Juni 2001

Berdasarkan data Tabel 8 di atas, diperoleh keterangan, bahwa responden yang menjawab (a) 11 orang, yang menjawab (b) 13 orang, dan yang menjawab (c) 76 orang.

Dari data tersebut maka nilai kategorinya adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \bar{X} &= \sum \frac{f_i x_i}{f_i} \\ &= \frac{135}{100} \\ &= 1,35 \text{ (kategori kurang)} \end{aligned}$$

Dengan demikian frekuensi jawaban responden tentang pemenuhan kebutuhan perumahan adalah 1,35. Nilai tersebut berada pada kategori *kurang* karena berada pada interval antara 1,00 – 1,66 sebagaimana diketahui dari diagram berikut:

Kurang	Cukup	Baik
1,00 – 1,66	1,67 – 2,33	2,34 – 3,00

Data tersebut dapat ditafsirkan bahwa makanan yang dikonsumsi oleh para petani miskin di Kecamatan Singaparna kurang terpenuhi gizinya.

Sebagaimana diketahui bahwa standar normal yang dikeluarkan oleh Biro Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2001, bahwa standar nasional normal kebutuhan gizi makanan seseorang setiap kali makan adalah 1.700 kilo kalori/orang dengan jenis makanan: nasi, ikan/daging, sayuran, tahu tempe, dan susu. Atau empat sehat lima sempurna.²

Bagi masyarakat petani di Kecamatan Singaparna, seseorang yang kurang terpenuhi kebutuhan makannya, berarti sama dengan miskin. Jadi, mereka yang dianggap miskin adalah mereka yang kebutuhan makannya kurang terpenuhi. Berdasarkan hasil wawancara diperoleh keterangan, bahwa makanan yang mereka konsumsi dalam keseharian

² ***Tasikmalaya dalam Angka Tahun 2001.*** (Tasikmalaya: BPS-BAPPEDA, 2001), hal. LXIII.

cukup sederhana, yaitu nasi, kerupuk, ikan asin, sambal, tahu, dan jarang minum susu.³

Kemudian, pertanyaan nomor 4 yang diajukan adalah: Berapa kali Bapak dalam setiap hari? Jawaban responden adalah sebagaimana terlihat pada Tabel 9 berikut:

Tabel 9
Persepsi Responden mengenai Frekuensi Makan dalam Tiap Hari
(n = 100)

No	Alternatif Jawaban	fi	xi	fixi
1	a. Tiga kali sehari	16	3	48
2	b. Dua kali sehari	17	2	34
3	c. Sekali sehari	67	1	67
Σ	Jumlah	100		159

Sumber: Hasil penelitian lapangan, 1 – 30 Juni 2001

Berdasarkan data Tabel 8 di atas, diperoleh keterangan, bahwa responden yang menjawab (a) 16 orang, yang menjawab (b) 17 orang, dan yang menjawab (c) 67 orang.

³Wawancara dengan para petani miskin di Kecamatan Singaparna, tanggal 1-30 Juni 2001.

Dari data tersebut maka nilai kategorinya adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned}\bar{X} &= \sum \frac{f_i x_i}{f_i} \\ &= \frac{159}{100} \\ &= 1,59 \text{ (kategori kurang)}\end{aligned}$$

Dengan demikian frekuensi jawaban responden tentang pemenuhan kebutuhan perumahan adalah 1,59. Nilai tersebut berada pada kategori *kurang* karena berada pada interval antara 1,00 – 1,66 sebagaimana diketahui dari diagram berikut:

Kurang	Cukup	Baik
1,00 – 1,66	1,67 – 2,33	2,34 – 3,00

Data tersebut dapat ditafsirkan bahwa masyarakat petani miskin yang ada di Kecamatan Singaparna belum terpenuhi kebutuhan dasar pangannya karena sebagian besar dari mereka makan dalam setiap harinya sebanyak satu kali.

3. Pemenuhan Kebutuhan Perumahan (Papan)

Untuk mengetahui terpenuhi atau tidaknya kebutuhan perumahan (papan) di kalangan petani miskin yang ada di Kecamatan Singaparna,

penulis mengajukan angket nomor 5 dan 6 kepada 100 orang responden dengan kriteria: jenis perumahan yang dihuni, dan harga jual rumah.

Pertanyaan nomor 5 adalah: Bagaimana menurut pandangan Bapak, apakah rumah yang saat ini Bapak tempati bersama keluarga dianggap sudah permanen atau belum? Jawaban yang diperoleh adalah sebagaimana terlihat pada Tabel 10 berikut:

Tabel 10
Persepsi Responden mengenai Jenis Perumahan yang Dihuni
(n = 100)

No	Alternatif Jawaban	fixi
1	a. Tembok Permanen	21
2	b. Setengah tembok	102
3	c. Panggung	42
Σ	Jumlah	165

Sumber: Hasil penelitian lapangan, 1 – 30 Juni 2001

Berdasarkan data tabel 10 di atas, diperoleh keterangan, bahwa responden yang menjawab (a) 7 orang, yang menjawab (b) 51 orang, dan yang menjawab (c) 42 orang.

Dari data tersebut maka nilai kategorinya adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \overline{X} &= \sum \frac{f_i x_i}{f_i} \\ &= \frac{165}{100} \\ &= 1,65 \text{ (kategori kurang)} \end{aligned}$$

Dengan demikian frekuensi jawaban responden tentang jenis perumahan yang dihuni adalah 1,65. Nilai tersebut berada pada kategori *kurang* karena berada pada interval antara 1,00 – 1,66 sebagaimana diketahui dari diagram berikut:

Kurang	Cukup	Baik
1,00 – 1,66	1,67 – 2,33	2,34 – 3,00

Data tersebut dapat ditafsirkan bahwa perumahan yang dihuni oleh para petani miskin di Kecamatan Singaparna kebanyakan setengah tembok dan setengah bilik. Dengan demikian rumah yang dihuni oleh mereka termasuk kurang layak, sehingga dilihat dari aspek ini maka mereka termasuk kategori miskin.

Kemudian pertanyaan nomor 6 adalah: Berapa kira-kira harga jual rumah yang Bapak huni dengan keluarga? Jawaban yang diperoleh adalah sebagaimana terlihat pada Tabel 11 berikut.

Tabel 11
Persepsi Responden mengenai Harga Jual Rumah yang Dihuni
(n = 100)

No	Alternatif Jawaban	fi	xi	fixi
1	a. Diatas 50 juta	-	3	0
2	b. Kurang dari 50 juta	-	2	0
3	c. di bawah 5 juta	100	1	100
Σ	Jumlah	100		100

Sumber: Hasil penelitian lapangan, 1 – 30 Juni 2001

Berdasarkan data tabel 11 di atas, diperoleh keterangan, bahwa responden yang menjawab (a) tidak adak, yang menjawab (b) tidak ada, dan yang menjawab (c) 100 orang.

Dari data tersebut maka nilai kategorinya adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned}\overline{X} &= \sum \frac{f_i x_i}{f_i} \\ &= \frac{100}{100} \\ &= 1,00 \text{ (kategori kurang)}\end{aligned}$$

Dengan demikian frekuensi jawaban responden tentang harga rumah yang dihuni adalah 1,00. Nilai tersebut berada pada kategori *kurang* karena berada pada interval antara 1,00 – 1,66 sebagaimana diketahui dari diagram berikut:

Kurang	Cukup	Baik
1,00 – 1,66	1,67 – 2,33	2,34 – 3,00

Data tersebut dapat ditafsirkan bahwa harga jual rumah yang dihuni oleh para petani miskin di Kecamatan Singaparna seluruhnya adalah dibawah 5 juta rupiah. Tentu saja harga jual rumah yang demikian dianggap sangat murah, karena memang rumahnya sangat sederhana sekali. Dengan demikian rumah yang dihuni oleh mereka

termasuk kurang layak, sehingga dilihat dari aspek ini maka mereka termasuk kategori miskin.

Berdasarkan kedua data mengenai pemenuhan kebutuhan perumahan tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa rumah yang mereka huni kurang layak jika dilihat dari jenis perumahan dan harga jual rumah yang mereka huni.

Kurangnya pemenuhan kebutuhan akan perumahan merupakan ciri mendasar seseorang atau masyarakat miskin. Sebab menurut Tjahya Supriatna⁴, suatu keadaan disebut miskin bila ditandai oleh kekurangan atau tidak mampu memenuhi tingkat kebutuhan dasar manusia. Pemenuhan kebutuhan akan perumahan merupakan kebutuhan dasar sekunder manusia yang harus terpenuhi. Jika kebutuhan akan perumahan tidak terpenuhi, maka orang tersebut termasuk kategori miskin.

⁴ Tjahya Supriatna, ***Birokrasi: Pemberdayaan dan Pengentasan Kemiskinan***, Cet. I (Bandung: Humaniora, 1997), hal. 82.

4. Pemenuhan Kebutuhan Kesehatan

Untuk mengetahui terpenuhi atau tidaknya kebutuhan kesehatan di kalangan petani miskin yang ada di Kecamatan Singaparna, penulis mengajukan angket nomor 7 dan 8 kepada 100 orang responden dengan kriteria: keinginan berobat jika sakit, dan jumlah kunjungan ke dokter atau puskesmas.

Pertanyaan nomor 7 adalah: Jika Bapak dan keluarga sakit, biasanya suka dibawa ke mana? Jawaban yang diperoleh dari responden adalah sebagaimana terlihat pada Tabel 12 berikut:

Tabel 12
Persepsi Responden mengenai Keinginan Berobat Jika Sakit
(n = 100)

No	Alternatif Jawaban	fi	xi	fixi
1	a. Di bawa ke dokter atau Puskesmas	6	3	18
2	b. Di bawa ke dukun	12	2	24
3	c. Obat tradisional	82	1	82
Σ	Jumlah	100		124

Sumber: Hasil penelitian lapangan, 1 – 30 Juni 2001

Berdasarkan data tabel 12 di atas, diperoleh keterangan, bahwa responden yang menjawab (a) 6 orang, yang menjawab (b) 12 orang, dan yang menjawab (c) 82 orang.

Dari data tersebut maka nilai kategorinya adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned}\overline{X} &= \sum \frac{f_i x_i}{f_i} \\ &= \frac{124}{100} \\ &= 1,24 \text{ (kategori kurang)}\end{aligned}$$

Dengan demikian frekuensi jawaban responden tentang keinginan berobat jika sakit adalah 1,24. Nilai tersebut berada pada kategori *kurang* karena berada pada interval antara 1,00 – 1,66 sebagaimana diketahui dari diagram berikut:

Kurang	Cukup	Baik
1,00 – 1,66	1,67 – 2,33	2,34 – 3,00

Data tersebut dapat ditafsirkan bahwa jika para petani miskin dan keluarganya sakit, maka mereka mengobati cukup dengan ramuan-ramuan tradisional yakni menggunakan tanaman-tanaman yang ada di sekitar rumah mereka, seperti kebun, ladang, atau hutan.

Bagi masyarakat petani di Kecamatan Singaparna, sebenarnya mereka berkeinginan untuk berobat ke dokter atau puskesmas. Namun mengingat keterbatasan keuangan mereka, sehingga mereka melakukan

pengobatan dengan cara tradisional saja sebagaimana yang dilakukan oleh nenek moyangnya dahulu.⁵

Sedangkan pertanyaan nomor 8 adalah: Berapa kali Bapak dan keluarga berkunjung ke dokter atau puskesmas jika sakit? Jawaban yang diperoleh dari responden adalah sebagaimana terlihat pada Tabel 13 berikut:

Tabel 13
Persepsi Responden mengenai Frekuensi Kunjungan
ke Dokter atau Puskesmas
(n = 100)

No	Alternatif Jawaban	fi	xi	fixi
1	a. Seminggu sekali	3	3	9
2	b. Sebulan sekali	9	2	18
3	c. Tidak pernah	88	1	88
Σ	Jumlah	100		115

Sumber: Hasil penelitian lapangan, 1 – 30 Juni 2001

Berdasarkan data Tabel 13 di atas, diperoleh keterangan, bahwa responden yang menjawab (a) 3 orang, yang menjawab (b) 9 orang, dan yang menjawab (c) 88 orang.

⁵Wawancara dengan para petani miskin di Kecamatan Singaparna, tanggal 1-30 Juni 2001.

Dari data tersebut maka nilai kategorinya adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned}\overline{X} &= \sum \frac{f_i x_i}{f_i} \\ &= \frac{115}{100} \\ &= 1,15 \text{ (kategori kurang)}\end{aligned}$$

Dengan demikian frekuensi jawaban responden tentang keinginan berobat jika sakit adalah 1,15. Nilai tersebut berada pada kategori *kurang* karena berada pada interval antara 1,00 – 1,66 sebagaimana diketahui dari diagram berikut:

Kurang	Cukup	Baik
1,00 – 1,66	1,67 – 2,33	2,34 – 3,00

Data tersebut dapat ditafsirkan bahwa frekuensi kunjungan ke dokter atau puskesmas yang dilakukan oleh para petani miskin dan keluarganya yang ada di Kecamatan Singaparna sangat kurang. Artinya, mereka kurang atau bahkan tidak pernah sama sekali berkunjung ke dokter atau puskesmas, baik untuk mengobati penyakitnya ataupun mengecek kondisi kesehatannya. Hal ini karena mereka umumnya menggunakan cara-cara tradisional dalam menjaga kesehatan ataupun mengobati penyakitnya.

Berdasarkan data tersebut di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa tingkat kesehatan masyarakat petani di Kecamatan Singaparna masih rendah. Dengan kata lain, kebutuhan dasar akan kesehatan di kalangan mereka masih belum terpenuhi. Atau, mereka kurang menggunakan institusi-institusi kesehatan ketika mereka menjaga kesehatan ataupun ketika mengobati penyakitnya.

5. Pemenuhan Kebutuhan Pendidikan

Untuk mengetahui terpenuhi atau tidaknya kebutuhan pendidikan di kalangan petani miskin yang ada di Kecamatan Singaparna, penulis mengajukan angket nomor 9 dan 10 kepada 100 orang responden dengan kriteria: menyekolahkan anaknya ke jenjang yang lebih tinggi, dan fasilitas belajar yang dimiliki anaknya.

Pertanyaan nomor 9 adalah: Apakah Bapak telah menyekolahkan anak-anak ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi? Jawaban yang diperoleh dari responden adalah sebagaimana terlihat pada Tabel 14 berikut:

Tabel 14
Persepsi Responden mengenai Menyekolahkan Anak
(n = 100)

No	Alternatif Jawaban	fi	xi	fixi
1	a. Hingga Perguruan Tinggi	0	3	0
2	b. Hanya sampai Sekolah Dasar	50	2	100
3	c. Tidak Menyekolahkan Sama Sekali	50	1	50
Σ	Jumlah	100		150

Sumber: Hasil penelitian lapangan, 1 – 30 Juni 2001

Berdasarkan data Tabel 14 di atas, diperoleh keterangan, bahwa responden yang menjawab (a) tidak ada, yang menjawab (b) 50 orang, dan yang menjawab (c) 50 orang.

Dari data tersebut maka nilai kategorinya adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \bar{X} &= \sum \frac{f_i x_i}{f_i} \\ &= \frac{100}{100} \\ &= 1,00 \text{ (kategori kurang)} \end{aligned}$$

Dengan demikian frekuensi jawaban responden tentang menyekolahkan anak-anak adalah 1,00. Nilai tersebut berada pada kategori *kurang* karena berada pada interval antara 1,00 – 1,66 sebagaimana diketahui dari diagram berikut:

Kurang	Cukup	Baik
1,00 – 1,66	1,67 – 2,33	2,34 – 3,00

Data tersebut dapat ditafsirkan bahwa tingkat pendidikan anak-anak para petani miskin yang ada di Kecamatan Singaparna paling tinggi tamat Sekolah Dasar, bahkan yang tidak sekolah sama sekali juga cukup banyak.

Bagi masyarakat petani di Kecamatan Singaparna, sebenarnya mereka berkeinginan untuk menyekolahkan anak-anaknya ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Namun yang paling penting menurut mereka adalah bagaimana anak-anak itu dapat membantu orang tuanya bertani dan bercocok tanam, sehingga anak-anaknya tidak perlu memiliki tingkat pendidikan yang tinggi, cukup tamat Sekolah Dasar saja sudah untung.⁶

Sedangkan pertanyaan nomor 10 adalah: Apakah buku-buku pelajaran yang dimiliki oleh anak Bapak sudah dianggap cukup memadai? Jawaban yang diperoleh dari responden adalah sebagaimana terlihat pada Tabel 15 berikut:

⁶Wawancara dengan para petani miskin di Kecamatan Singaparna, tanggal 1-30 Juni 2001.

Tabel 15
Persepsi Responden mengenai Fasilitas Pendidikan yang Dimiliki
(n = 100)

No	Alternatif Jawaban	f _i	x _i	fixi
1	a. Memadai	0	3	0
2	b. Kurang memadai	19	2	38
3	c. Tidak memadai sama sekali	81	1	81
Σ	Jumlah	100		119

Sumber: Hasil penelitian lapangan, 1 – 30 Juni 2001

Berdasarkan data Tabel 15 di atas, diperoleh keterangan, bahwa responden yang menjawab (a) tidak ada, yang menjawab (b) 19 orang, dan yang menjawab (c) 81 orang.

Dari data tersebut maka nilai kategorinya adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned}\bar{X} &= \sum \frac{f_i x_i}{f_i} \\ &= \frac{119}{100} \\ &= 1,19 \text{ (kategori kurang)}\end{aligned}$$

Dengan demikian frekuensi jawaban responden tentang keinginan berobat jika sakit adalah 1,19. Nilai tersebut berada pada kategori *kurang* karena berada pada interval antara 1,00 – 1,66 sebagaimana diketahui dari diagram berikut:

Kurang	Cukup	Baik
1,00 – 1,66	1,67 – 2,33	2,34 – 3,00

Data tersebut dapat ditafsirkan bahwa fasilitas pendidikan yang dimiliki oleh keluarga petani miskin di Kecamatan Singaparna sebagian besar tidak memadai. Artinya, keluarga petani tersebut tidak memiliki fasilitas pendidikan seperti buku pelajaran, alat-alat belajar, dan sarana penunjang belajar lainnya.

Berdasarkan data tersebut di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pemenuhan kebutuhan pendidikan pada petani miskin di Kecamatan Singaparna masih kurang. Dengan kata lain, di samping tingkat pendidikannya masih rendah, juga fasilitas belajar mengajar yang mereka miliki belum memenuhi kelayakan.

Berdasarkan hasil temuan di lapangan yang berkaitan dengan persepsi petani di Kecamatan Singaparna mengenai kemiskinan dilihat dari pemenuhan kebutuhan sandang, pangan, perumahan, kesehatan dan pendidikan sebagaimana telah dibahas di atas, maka kesimpulan dari data tersebut adalah sebagaimana terlihat pada rekapitulasi data pada Tabel 16 berikut:

Tabel 16
Rekapitulasi Nilai Persepsi Petani Mengenai Kemiskinan Dilihat dari Pemenuhan Kebutuhan Sandang, Pangan, Perumahan, Kesehatan dan Pendidikan

Indikator		Instrumen Indikator	No. Item	fi	fixi
Pemenuhan Kebutuhan Sandang		1. Frekuensi Petani Membeli Pakaian dalam Setiap Bulannya	1	100	151
		2. Kriteria Harga Pakaian yang Mereka Beli	2	100	119
Pemenuhan Kebutuhan Pangan		1. Pemenuhan terhadap Gizi Makanan yang Dikonsumsi	3	100	135
		2. Frekuensi Makan dalam tiap Hari	4	100	159
Pemenuhan Kebutuhan Perumahan		1. Jenis Perumahan yang Dihuni	5	100	165
		2. Harga Jual Rumah yang Dihuni	6	100	100
Pemenuhan Kebutuhan Kesehatan		1. Keinginan Berobat Jika Sakit	7	100	124
		2. Jumlah Kunjungan ke Dokter atau Puskesmas	8	100	115
Pemenuhan Kebutuhan Pendidikan		1. Menyekolahkan Anak ke Jenjang yang lebih Tinggi	9	100	150
		2. Fasilitas Pendidikan yang Dimiliki	10	100	119
Jumlah			10	1.000	1.337

Dari data Tabel 16 tersebut di atas, maka dapat diperoleh rekapitulasi nilai pada variabel pertama yang berkaitan dengan persepsi petani mengenai kemiskinan dilihat dari pemenuhan kebutuhan sandang, pangan, perumahan, kesehatan dan pendidikan adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned}\bar{X} &= \sum \frac{f_i x_i}{f_i} \\ &= \frac{1337}{1000} \\ &= 1,337 \text{ dibulatkan } 1,34 \text{ (kategori kurang)}\end{aligned}$$

Dengan demikian rekapitulasi nilai pada variabel pertama tentang persepsi petani mengenai kemiskinan dilihat dari pemenuhan kebutuhan sandang, pangan, perumahan, kesehatan dan pendidikan adalah 1,34. Nilai tersebut berada pada kategori *kurang* karena berada pada interval antara 1,00 – 1,66 sebagaimana diketahui dari diagram berikut:

Kurang	Cukup	Baik
1,00 – 1,66	1,67 – 2,33	2,34 – 3,00

Kesimpulan ini dapat ditafsirkan bahwa persepsi petani di Kecamatan Singaparna mengenai pemenuhan kebutuhan dasar manusia masih kurang. Hal ini disebabkan karena rendahnya persepsi mereka tentang kemiskinan dilihat dari pemenuhan kebutuhan sandang, pangan, perumahan, kesehatan dan pendidikan. Dengan kata lain, petani di Kecamatan Singaparna pada umumnya masih tergolong miskin, karena kebutuhan dasar hidup mereka belum terpenuhi.

Menurut hemat penulis, pada dasarnya kurangnya pemenuhan terhadap kebutuhan dasar hidup di kalangan petani di Kecamatan

Singaparna tersebut ujung-ujungnya adalah karena rendahnya pendapat mereka yang tidak memenuhi standar, sehingga mereka termasuk kategori miskin.

Sebagaimana diketahui, bahwa salah satu kriteria untuk mengukur kemiskinan penduduk adalah dengan menggunakan Rasio Kebutuhan Fisik Minimum (RFKM). Apabila diasumsikan kebutuhan fisik minimum sesuai dengan kondisi yang dihadapi sekarang, maka untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum empat sehat lima sempurna adalah sebesar Rp 2.500,- perkapita per hari, dapat ditentukan besarnya kebutuhan fisik minimum per bulan. Dengan nilai tersebut dapat dihitung nilai kebutuhan fisik minimum per bulan adalah sebesar: $\text{Rp } 2.500,- \times 30 \text{ hari}$ sama dengan $\text{Rp } 75.000,-$ dan per tahun sebesar $\text{Rp } 2.500,- \times 365 \text{ hari}$ sama dengan $\text{Rp } 912.500,-$ ⁷

Sebagaimana diketahui bahwa pendapatan perkapita penduduk Kecamatan Singaparna, khususnya dua desa yang menjadi objek penelitian (Desa Cipakat dan Desa Cikunir) adalah berkisar antara $\text{Rp } 30.000,-$ sampai $\text{Rp } 60.000,-$ per bulannya, maka jika mengikuti

⁷ Tjahya Supriatna, *Op. Cit.*, hal. 83.

standar kriteria kemiskinan sebagaimana tersebut di atas, berarti para petani yang ada di Kecamatan Singaparna termasuk ke dalam kategori miskin, karena penghasilan mereka kurang dari Rp 75.000,- per bulannya. Oleh karena itu wajar apabila dua desa tersebut termasuk ke dalam desa IDT (Inpres Desa Tertinggal).

B. Upaya Petani Miskin Pedesaan di Kecamatan Singaparna dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarganya

Sebagaimana telah disimpulkan dalam pembahasan terdahulu, bahwa rendahnya tingkat pemenuhan kebutuhan dasar manusia di kalangan petani miskin di Kecamatan Singaparna termasuk masih rendah, terutama dilihat dari pemenuhan kebutuhan akan sandang, pangan, perumahan, kesehatan dan pendidikan. Kemudian disimpulkan pula bahwa rendahnya pemenuhan kebutuhan dasar tersebut disebabkan oleh rendahnya pendapatan atau penghasilan mereka, yakni hanya Rp 30.000,- per bulannya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan para petani miskin yang ada di Kecamatan Singaparna, sebenarnya mereka mengakui bahwa dirinya termasuk kategori masyarakat miskin. Oleh karena desa mereka termasuk dalam program IDT. Kesadaran ini kemudian menimbulkan keinginan untuk berupaya mengentaskan kemiskinan guna meningkatkan

kesejahteraannya. Dari hasil wawancara diperoleh keterangan bahwa upaya yang mereka lakukan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarganya adalah dengan cara meningkatkan pendapatan ekonomi keluarga, dan meningkatkan kualitas pendidikan guna meningkatkan kualitas sumber dayanya.⁸

Upaya pertama yang dilakukan oleh petani miskin dalam meningkatkan kesejahteraan keluarganya adalah dengan cara meningkatkan pendapatan ekonomi keluarga. Upaya ini dilakukan dengan cara membagi tugas antara suami dan isteri. Suami bertugas mencari nafkah dengan cara menjadi buruh bangunan dan penggalian pasir. Sedangkan isterinya berusaha mencari tambahan penghasilan dengan menjadi buruh/pembantu.⁹

Di samping upaya peningkatan pendapatan ekonomi keluarga, para petani di Kecamatan Singaparna juga melakukan upaya peningkatan pendidikan anak-anaknya. Upaya ini didukung oleh keinginan yang kuat pada diri orang tua. Caranya adalah kedua orang tua berusaha

⁸ Hasil wawancara dengan Petani di Kecamatan Singaparna, tanggal 1-30 Juni 2001

⁹ Wawancara tanggal 1-30 Juni 2001

melakukan pendekatan dengan pihak sekolah atau pemerintah setempat agar diberikan keringanan biaya sekolah dan juga mencari orang tua asuh yang sudah terorganisir di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya.¹⁰

Berdasarkan hasil wawancara tersebut di atas, berarti upaya yang dilakukan oleh petani yang ada di Kecamatan Singaparna dalam meningkatkan kesejahteraan keluarganya adalah melalui peningkatan pendapatan ekonomi keluarga serta peningkatan kualitas pendidikan anak-anaknya.

Dari data tersebut penulis melihat bahwa upaya yang dilakukan oleh para petani miskin yang ada di Kecamatan Singaparna dalam meningkatkan kesejahteraan keluarganya masih jauh dari harapan. Sebab, kedua upaya tersebut yaitu peningkatan pendapatan ekonomi keluarga dan peningkatan kualitas pendidikan itu pada akhirnya akan bermuara pada kemampuan ekonomi mereka. Upaya ini jika tanpa didukung oleh pemerintah adalah sangat mustahil dapat berhasil. Oleh karena itu di sinilah pentingnya peranan pemerintah dalam membantu

¹⁰ Wawancara tanggal 1-30 Juni 2001

mengentaskan kemiskinan. Bukankah di antara desa yang ada di Kecamatan Singaparna termasuk kategori IDT? Kenapa tidak melalui program ini untuk mengentaskan kemiskinan yang mereka derita.

Sebagaimana diketahui bahwa kebijakan yang dicanangkan oleh pemerintah dalam rangka mengentaskan kemiskinan adalah melalui:

1. Memajukan perekonomian yang diimbangi oleh kualitas SDM
2. Membangun bangsa mandiri
3. Membentuk masyarakat yang sejahtera¹¹

Ketiga kebijakan tersebut direalisasikan dengan program IDT (Inpres Desa Tertinggal). Program IDT ini dimaksudkan untuk meningkatkan potensi dan dinamika ekonomi masyarakat lapisan bawah. program ini juga merupakan program gerakan yang berorientasi pada masyarakat miskin di desa sehingga relevan dengan pembangunan sektoral, regional, daerah, dan pembangunan masyarakat desa.

Di samping itu, rendahnya tingkat pendapatan masyarakat miskin pada akhirnya juga disebabkan karena rendahnya pendidikan mereka.

¹¹ Tjahya Supriatna, *Op. Cit.*, hal. 22

Hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Tjahya Supriatna¹² bahwa kemiskinan mempunyai korelasi dengan tingkat pendidikan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat dikatakan di sini bahwa upaya petani di Kecamatan Singaparna dalam meningkatkan kesejahteraan keluarganya melalui peningkatan pendapatan ekonomi keluarga dan peningkatan kualitas pendidikan itu sebenarnya sudah tepat. Namun, upaya tersebut tidak akan berhasil tanpa dukungan pihak pemerintah melalui program-program pembangunannya, terutama program IDT yang selama ini sudah berjalan.

Pentingnya peranan pemerintah dalam pengentasan kemiskinan adalah karena pemerintah mempunyai kedudukan yang sangat strategis. Kedudukan yang sangat strategis tersebut berkaitan dengan fungsinya sebagai "pelayan publik" guna meningkatkan kesejahteraan, keadilan, keamanan, dan ketenteraman masyarakat.

Jadi, pemerintah melalui program IDT perlu terus mendukung upaya masyarakat dalam mengentaskan kemiskinan. Sebab dalam program IDT tersebut diharapkan adanya pertumbuhan partisipasi

¹² *Ibid.*, hal. 91

masyarakat dalam proses pembangunan. Partisipasi masyarakat tersebut bisa tumbuh apabila pemerintah mampu menggerakkannya. Sebab, sesungguhnya partisipasi masyarakat miskin dalam pembangunan itu tidak mungkin muncul dengan sendirinya tanpa motivasi dan dukungan dari pemerintah.

C. Kendala-kendala yang Dihadapi Petani Miskin Pedesaan di Kecamatan Singaparna dalam Meningkatkan Kesejahteraan

Berdasarkan hasil wawancara dengan 100 orang petani yang ada di Kecamatan Singaparna diperoleh jawaban bahwa kendala-kendala yang dihadapi petani dalam meningkatkan kesejahteraannya di antaranya adalah: keterbatasan kesempatan kerja, rendahnya kualitas SDM, minimnya modal usaha, kurangnya peranan pemerintah, dan rendahnya potensi alam.¹³

Kendala pertama yang dihadapi oleh petani dalam upaya mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan keluarga adalah terbatasnya kesempatan kerja. Hal ini bisa dimaklumi karena

¹³ Hasil wawancara tanggal 1-30 Juni 2001

mengingat kesempatan kerja yang ada di kecamatan tersebut sangat terbatas, terutama di dua desa yang menjadi sampel objek penelitian.

Kemudian kendala kedua adalah rendahnya kualitas SDM. Sebagaimana diketahui dalam data hasil penelitian, bahwa kualitas pendidikan yang dimiliki oleh masyarakat sangat rendah, karena rata-rata tingkat pendidikan mereka paling tinggi adalah tamatan Sekolah Dasar.

Kendala berikutnya adalah kurangnya peranan pemerintah dalam mendukung upaya petani dalam mengentaskan kemiskinan. Kurangnya dukungan pemerintah, terutama Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya bisa saja karena keterbatasan keuangan dari pemerintah itu sendiri.

Kendala terakhir dari upaya petani dalam meningkatkan kesejahteraan keluarganya adalah rendahnya potensi alam. Sebagaimana diketahui bahwa kondisi alam di Kecamatan Singaparna lebih cenderung perbukitan dan persawahan yang hanya memungkinkan untuk berusaha di bidang penggalian tanah dan ladang sawah. Keadaan ini tentu saja kurang menunjang bagi upaya petani itu sendiri dalam menanggulangi kemiskinan yang dideritanya.

Berdasarkan pembahasan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa kendala-kendala yang dialami oleh petani dalam meningkatkan

kesejahteraan keluarga guna mengentaskan kemiskinan adalah keterbatasan kesempatan kerja, rendahnya kualitas SDM, minimnya modal usaha, kurangnya peranan pemerintah, dan rendahnya potensi alam.



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil temuan dan pembahasan penelitian sebagaimana telah dirumuskan dalam rumusan masalah, maka simpulan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Persepsi petani di Kecamatan Singaparna mengenai kemiskinan dilihat dari pemenuhan kebutuhan sandang, pangan, perumahan, kesehatan dan pendidikan termasuk kategori rendah/kurang. Karena nilai kategori yang diperoleh adalah sebesar 1,34 yang berarti pada interval nilai rendah (1,00 – 1,66). Dalam hal ini kebutuhan dasar manusia seperti sandang, pangan, perumahan, kesehatan dan pendidikan di kalangan petani di Kecamatan Singaparna belum terpenuhi secara minimal, apalagi maksimal.
2. Upaya yang dilakukan oleh petani di Kecamatan Singaparna dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga guna mengentaskan kemiskinan yaitu melalui meningkatkan pendapatan ekonomi keluarga dan meningkatkan kualitas pendidikan guna meningkatkan kualitas SDM.

3. Kendala yang dihadapi oleh petani di Kecamatan Singaparna dalam upaya meningkatkan kesejahteraan keluarganya meliputi: keterbatasan kesempatan kerja, rendahnya kualitas SDM, minimnya modal usaha, kurangnya peranan pemerintah, dan rendahnya potensi alam.

B. Saran-saran

Berdasarkan hasil temuan di lapangan diperoleh data, maka diperoleh kesimpulan bahwa masyarakat petani di Kecamatan Singaparna masih menghadapi masalah kemiskinan. Atas dasar temuan itulah, maka penulis menyarankan kepada berbagai pihak terutama:

1. Persoalan kemiskinan bisa menjadi persoalan pribadi dan juga persoalan negara. Atas dasar itu, secara pribadi seyogyanya ada upaya konkret dari para petani dalam meningkatkan kesejahtraannya, yang salah satunya adalah dengan berupaya meningkatkan kualitas SDM melalui kemauan meningkatkan kualitas atau jenjang pendidikan di kalangan anak-anaknya. Sebab, anak-anak merupakan tunas bangsa masa depan yang perlu ditingkatkan kualitas SDM nya.
2. Di samping peranan pribadi dalam meningkatkan kesejahteraan, maka peranan Pemerintah juga sangat diharapkan melalui program-

program pembangunannya dalam mengentaskan kemiskinan, baik melalui program IDT, program Kawasan Terpadu, dan program lainnya. Sebab, apalah artinya upaya mandiri dari petani dalam mengentaskan kemiskinan tersebut tanpa dukungan formal dari Pemerintah.

3. Kemiskinan juga merupakan persoalan mendasar yang dihadapi oleh manusia dan suatu bangsa di dunia ketiga. Oleh karena itu, Islam juga mengajarkan bahwa kemiskinan merupakan pangkal utama lahirnya kekufuran. Di sinilah Islam menegaskan bahwa sesungguhnya ummat Islam itu harus kaya, dalam arti tidak meminta-minta.



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Zainal Abidin. 1968. ***Negara Utama: Teori Kenegaraan dari Sardjana Islam Al-Farabi***. Cetakan Pertama. Jakarta: Kinta.
- , 1979. ***Dasar-dasar Ekonomi Islam***. Cetakan Pertama. Jakarta: Bulan Bintang.
- Ali, Mohammad Daud. 1988. ***Sistem Ekonomi Islam, Zakat dan Wakaf***. Cetakan Pertama. Jakarta: UI Press.
- Ali, Mukti. 1987. ***Beberapa Persoalan Agama Dewasa Ini***. Cetakan Pertama. Jakarta: Rajawali.
- Al-Jurjawi, Ali Ahmad. 1931. ***Hikmah At-Tasyri' wa Falsafatuhu***. Cetakan Pertama. Cairo: Al-Yusufiyah.
- Arikunto, Suharsimi. 1993. ***Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik***. Cetakan Keempat. Jakarta: Bina Aksara.
- Azhari, Muntaha, dan Abdul Mun'im Saleh (Peny.). ***Islam Indonesia Menatap Masa Depan***. Cetakan Pertama. Jakarta: P3M.
- Bintarto, R. 1984. ***Interaksi Desa-Kota dan Permasalahannya***. Cetakan Kedua. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Effendi, Usman dan Juhaya S. Praja. 1993. ***Pengantar Psikologi***. Cetakan Pertama. Bandung: Angkasa.
- Huraerah, Abu (ed.). 2003. ***Isu Kesejahteraan Sosial di Tengah Ketidakpastian Indonesia***. Cetakan Pertama. Bandung: Ceplas.
- Husein, Machnun (Pen.). 1986. ***Etika Pembangunan dalam Pemiiran Islam di Indonesia***. Cetakan pertama. Jakarta: Rajawali.
- Imarah, Muhammad. 2000. ***Islam dan Keamanan Sosial***. Cetakan Kedua. Jakarta: Gema Insani Press.

- Kararah, Abbas. 1956. ***Ad-Dīn wa Az-Zakāt***. Cetakan Kelima. Mesir: Fannū Al-Taba'ah.
- Kartidirdjo, Sartono. 1981. ***Elite dalam Perspektif Sejarah***. Cetakan Pertama. Jakarta: LP3ES.
- Kartono, Kartini. 1984. ***Pengantar Psikologi***. Cetakan Pertama. Bandung: Mandar Maju.
- Keontjaraningrat. 1986. ***Pengantar Ilmu Antropologi***. Cetakan Keenam. Jakarta: Aksara Baru.
- Kuntowijoyo. 1991. ***Paradigma Islam: Interpretasi untuk Aksi***. Cetakan Pertama. Bandung: Mizan.
- Mansyur, Cholil, M. 1996. ***Sosiologi Masyarakat Kota dan Desa***. Cetakan Pertama. Surabaya: Usaha Nasional.
- Marzuki. 1986. ***Metodologi Riset***. Cetakan Keempat. Yogyakarta: BPFE-UII.
- Moedzakir, Djauzi, M. 1986. ***Teori & Praktek Pengembangan Masyarakat: Suatu pedoman Bagi Para Praktisi***. Cetakan Pertama. Surabaya: Usaha Nasional.
- Mubyarto. 1988. ***"Etika Keadilan Sosial dalam Islam"***. Dalam Mubyarto, dkk., ***Islam dan Kemiskinan***. Cetakan Pertama. Bandung: Pustaka.
- Mubyarto, dkk. 1984. ***Nelayan dan Kemiskinan***. Cetakan Pertama. Jakarta: Rajawali.
- Musa, Bakar. 1977. ***Hurriyatul Insān fil Islām***. Cetakan Kesembilan. Cairo: Ma'had Al-Azhar.
- Prawiranegara, Syafruddin. t.t. ***Sistem Ekonomi Islam***. Cetakan Pertama. Jakarta: Publicita.
- Rahman, Afzalur. 1995. ***Doktrin Ekonomi Islam***. Jilid 3. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf.

- Rakhmat, Jalaluddin. 1994a. ***Psikologi Komunikasi***. Cetakan Keempat. Bandung: Remadja Rosda Karya.
- 1994b. ***Islam Alternatif***. Cetakan Keempat. Bandung: Mizan.
- Rodinson, Maxime. 1982. ***Islam dan Kapitalisme***. Cetakan Pertama. Bandung: Iqra.
- Sajogjo & Pudjiwati. 1983. ***Sosiologi Pedesaan***. Jilid I. Cetakan Ketiga. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Schoorl, J.W. 1984. ***Modernisasi: Pengantar Sosiologi Pembangunan Negara-negara Sedang Berkembang***. Terjemahan R.G. Soekadijo. Cetakan Keempat. Jakarta: Gramedia.
- Shihab, Muhammad Quraish. 1994. ***Mmebumikan Al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat***. Cetakan Keempat. Bandung: Mizan.
- Singarimbun, Masri, dan Sofian Effendi (Penyunting). 1987. ***Metode Penelitian Survei***. Cetakan Kedelapan. Jakarta: LP3ES.
- Slameto. 1987. ***Belajar dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya***. Cetakan Pertama. Jakarta: Rieneka Cipta.
- Soekanto, Soejono. 1994. ***Sosiologi Suatu Pengantar***. Cetakan Kedelapan Belas. Jakarta: Rajawali.
- Soelaeman, Moenandar. 1992. ***Ilmu Sosial Dasar Teori dan Konsep Ilmu Sosial***. Cetakan Pertama. Bandung: Eresco.
- Sudjana. 1988. ***Metode Statistik***. Cetakan Kedelapan. Bandung: Tarsito.
- Suhendi, Hendi. 1997. ***Fiqh Mu'amalah***. Cetakan Pertama. Bandung: Gunung Djati Press.
- Sujanto, Agus. 1989. ***Psikologi Umum***. Cetakan Pertama. Jakarta: Bina Aksara.

- Supriatna, Tjahya. 1997. ***Birokrasi: Pemberdayaan dan Pengentasan Kemiskinan***. Cetakan Pertama. Bandung: Humaniora.
- Surakhmad, Winarno. 1990. ***Dasar-dasar Penelitian***. Cetakan Ketigabelas. Bandung: Tarsito.
- Tasikmalaya dalam Angka Tahun 2000/2001***. Tasikmalaya: BPS-BAPPEDA.
- Tasmara, Toto. 1994. ***Etos Kerja Pribadi Muslim***. Cetakan Pertama. Yogyakarta: Karipta.
- Tjiptoherijanto, Prijono. 1988. ***"Moral Pembangunan dalam Sistem Ekonomi Islam"***. Dalam Mubyarto, dkk. ***Islam dan Kemiskinan***. Cetakan Pertama. Bandung: Pustaka.
- Usman, Sunyoto. 2003. ***Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat***. Cetakan Kedua. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Walgito, Bimo. 1991. ***Pengantar Psikologi Umum***. Cetakan Pertama. Yogyakarta: Offset.
- Wirawan, Sarlito. 1993. ***Pengantar Umum Psikologi***. Cetakan Pertama. Jakarta: Bulan Bintang.
- Wolf, Eric R. 1966. ***Peasant***. Cetakan Pertama. New Jersey: Prentice Hall-Inc.
- Ya'qub, Hamzah. 1992. ***Etos Kerja Islami: Petunjuk Pekerjaan yang Halal dan Haram dalam Syari'at Islam***. Cetakan Pertama. Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya.
- Yayasan Festival Istiqlal. 1996. ***Ruh Islam dalam Budaya Bangsa***. Cetakan Pertama. Jakarta: Yayasan Festival Istiqlal.
- Zuhdi, Masjufuk. 1993. ***Masail Fiqhiyah***. Cetakan Keempat. Jakarta: Haji Mas Agung.

Lampiran-Lampiran



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

PEDOMAN ANGKET

PETUNJUK:

- ♦ Isilah identitas pribadi Bapak/Ibu dengan sebenarnya.
- ♦ Bacalah seluruh pertanyaan angket di bawah ini dengan teliti dan seksama.
- ♦ Berilah tanda silang (X) pada salah satu jawaban yang Bapak/Ibu anggap benar dan jujur sesuai dengan keadaan sebenarnya.
- ♦ Terima kasih atas kerjasamanya

IDENTITAS:

Nama : _____

Umur : _____

Pendidikan : _____

Pekerjaan : _____

Jml. Keluarga : _____



**UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA**

PERTANYAAN:

1. Apakah Bapak sering membeli pakaian untuk keluarganya?
 - a. Seminggu sekali
 - b. Sebulan sekali
 - c. Setahun sekali
2. Berapa harga pakaian yang sering Bapak beli per potongnya?
 - a. Lebih dari Rp 50.000,- per potong
 - b. Antara Rp 25.000,- sampai Rp 49.000,- per potong
 - c. Kurang dari Rp 25.000,- per potong

3. Apakah makanan yang Bapak konsumsi penuh mengandung gizi atau tidak?
- Sangat terpenuhi
 - Kadang-kadang terpenuhi
 - Tidak pernah terpenuhi
4. Berapa kali Bapak dalam setiap hari makan?
- Tiga kali sehari
 - Dua kali sehari
 - Sekali sehari
5. Bagaimana menurut pandangan Bapak, apakah rumah yang saat ini Bapak tempati bersama keluarga dianggap sudah permanen atau belum?
- Tembok permanen
 - Setengah tembok
 - Panggung
6. Berapa kira-kira harga jual rumah yang Bapak huni dengan keluarga?
- Diatas 50 juta
 - Kurang dari 50 juta
 - Di bawah 5 juta
7. Jika Bapak dan keluarga sakit, biasanya suka dibawa ke mana?
- Di bawa ke dokter atau puskesmas
 - Di bawa ke dukun
 - Obat tradisional
8. Berapa kali Bapak dan keluarga berkunjung ke dokter atau puskesmas jika sakit?
- Seminggu sekali
 - Sebulan sekali
 - Tidak pernah



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

9. Apakah Bapak telah menyekolahkan anak-anak ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi?

- a. Hingga Perguruan Tinggi
- b. Hanya sampai Sekolah Dasar
- c. Tidak pernah

10. Apakah buku-buku pelajaran yang dimiliki oleh anak Bapak sudah dianggap cukup memadai?

- a. Memadai
- b. Kurang memadai
- c. Tidak memadai sama sekali



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA